MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI RIAU

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI RIAU

Tahun 2025

Pengadilan Tinggi Riau pt-riau.go.id +62853-5800-0101

PENGADILAN TINGGI RIAU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI RIAU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 18 Februari 2026

Pereviu I	Pereviu II
(T. Yudianto Syafei Narim, S.IP, S.H., M.M)	(Supriyadi, S.H.)

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025-2029, sehingga memiliki arti penting sebagai pijakan awal dalam mewujudkan arah pembangunan peradilan yang berkelanjutan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berfungsi sebagai instrumen evaluasi, pengendalian, serta peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau.

Pengukuran kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan target yang direncanakan. Laporan ini juga memuat berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih Pengadilan Tinggi Riau sepanjang Tahun 2025 sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga laporan ini menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Riau di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.

Ringkasan Eksekutif

Tabel 1. Capaian Kinerja (IKU Baru) Periode Januari-Desember 2025

CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2025

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG MANDIRI DALAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN, SETARA DAN BERKEADILAN				
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	100%	103,1%
	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%
	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktoriputusan	97%	100%	103,1%
	1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	99%	100%	101%
	1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	50%	52%	104%
	Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			**102,2%**
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,96	102,9%
	Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			**102,9%**
TUJUAN 2 : MEWUJUDKAN MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL				
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78	81,58	104,6%
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98	100	102%
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98	100	102%
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	85	106,3%
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	85	106,3%
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3	3,2	106,7%
	Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3			**104,6%**

RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1, 2 DAN 3

103,2%

Sehubungan dengan ditetapkannya Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK/RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025, yang disusun seiring dengan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pengadilan Tinggi Riau menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029 pada tanggal 3 November 2025.

Renstra tersebut disusun dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029. IKU tersebut terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama yang digunakan untuk mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis Pengadilan Tinggi Riau. Berdasarkan Renstra dan IKU tersebut, Perjanjian Kinerja ditetapkan pada tanggal 3 November 2025. Selanjutnya, pada akhir tahun 2025 dilakukan pengukuran kinerja untuk periode Januari sampai dengan Desember 2025 terhadap seluruh indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau dilaksanakan secara terintegrasi melalui aplikasi Evakip (E-Monev SAKIP) yang telah digunakan sejak tahun 2020. Seiring dengan kebutuhan penguatan sistem akuntabilitas kinerja, aplikasi tersebut kemudian dikembangkan tidak hanya sebagai alat pengukuran kinerja, tetapi juga mencakup fungsi perencanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam satu platform terintegrasi yang dikenal dengan SATRIA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Riau). Aplikasi Evakip telah direplikasi dan digunakan oleh seluruh satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, serta oleh beberapa Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, dan saat ini, aplikasi tersebut juga sedang dalam proses pengembangan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sehingga menjadi salah satu praktik baik (best practice) dalam penguatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan peradilan.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau menggunakan IKU baru yang diukur periode bulan Januari sampai dengan Desember 2025 berada pada kategori sangat baik. Sebagian besar indikator mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun ringkasan hasil pengukuran kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 (Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern) mencapai 102,2%. Capaian ini didukung oleh indikator kinerja ketepatan waktu penyelesaian perkara (103,1%), pengiriman salinan putusan (100%), publikasi putusan (103,1%), serta pemanfaatan e-Court (101%) dan e-Berpadu (104%).
2. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik) mencapai 102,9%. Capaian ini didukung dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan melampaui target (102,9%).
3. Sasaran Strategis 3 (Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional) mencapai 104,6%. Capaian ini didukung oleh indikator kinerja IP ASN (104,6%), IKPA DIPA 01 dan DIPA 03 (102%), kualitas perencanaan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 (106,3%), serta Indeks Pengelolaan Aset (106,7%).

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1, 2, dan 3 mencapai 103,2%, yang menegaskan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 telah berjalan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung serta perencanaan strategis yang ditetapkan, dan berhasil mencapai tujuan dan kinerja yang optimal.

Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa sebelum Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 ditetapkan, pada awal tahun 2025 Pengadilan Tinggi Riau telah terlebih dahulu menyusun Rancangan Renstra 2025–2029 dan menetapkan Penetapan Kinerja pada tanggal 2 Januari 2025. Penyusunan Rancangan Renstra dan Perjanjian Kinerja tersebut masih menggunakan Indikator Kinerja Utaman (IKU) lama tahun sebelumnya sebagai dasar pengukuran kinerja, yang terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja dan 2 (dua) Sasaran Strategis.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG PT-BANDUNG.GO.ID

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, capaian kinerja yang diukur menggunakan IKU lama periode Januari sampai dengan Oktober 2025, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1, yaitu "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel", mencapai 99,4%. Kinerja ini didukung indikator penyelesaian perkara perdata dan pidana tepat waktu (103,1%), penyelesaian perkara pidana khusus tepat waktu (100%), serta indeks kepuasan stakeholder (101,8%). Namun demikian, indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (89%), sehingga masih perlu ditingkatkan.
2. Sasaran Strategis 2, yaitu "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara", mencapai 100%. Pada sasaran ini seluruh indikator ketepatan waktu pengiriman salinan putusan perkara perdata, pidana, dan pidana khusus (100%) sesuai target.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja untuk Sasaran Strategis 1 dan 2 mencapai 99,7%, yang mencerminkan bahwa kinerja organisasi dengan periode pengukuran yang kurang dari satu tahun, namun telah berjalan efektif dan konsisten untuk mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2. Capaian Kinerja (dengan IKU Lama) Periode Januari s.d Oktober 2025

CAPAIAN KINERJA BULAN JANUARI s.d. OKTOBER TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	35,6%	89%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	98,7%	101,8%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			**99,4%**
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Waktu	100%	100%	100,0%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			**100,0%**
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2			**99,7%**

Secara umum, kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya berbagai prestasi dan penghargaan, baik oleh Pengadilan Tinggi Riau maupun oleh satuan kerja di bawahnya, yang berasal dari Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung, maupun instansi lintas sektoral. Salah satu capaian yang membanggakan adalah diraihnya penghargaan tertinggi dari Badan Peradilan Umum, yaitu Piala Abhinaya Upangga Wisesa. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diberikan kepada satuan kerja pengadilan dengan kinerja dan kualitas pelayanan terbaik.

Penghargaan yang diterima Pengadilan Tinggi Riau dari Badan Peradilan Umum & Mahkamah Agung RI

1. Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Piala Abhinaya Upangga Wisesa untuk satuan kerja peradilan yang berprestasi luar biasa dalam kinerja dan pelayanan publik dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 17 Desember 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

2. Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Predikat Unggul Sertifikasi Ampuh dengan Nilai 924 Tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 17 Desember 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

SERTIFIKAT

NOMOR 1692/DJU/SK.OT1.6/XII/2025

Komite Keputusan SertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan TangguH (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025

menyatakan bahwa:

PENGADILAN TINGGI RIAU

telah memenuhi standar AMPUH dengan predikat:

UNGGUL

Penilaian SertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan TangguH (AMPUH) akan dilakukan kembali setiap 1 (satu) tahun.

Jakarta, 3 Desember 2025
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

3. Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Terbaik I Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 di Tingkat Pengadilan Tinggi, dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

PIAGAM
PENGHARGAAN

BerAKHLAK

NOMOR 1693/DJU/SK.OT1.6/XII/2025

Diberikan kepada:

Pengadilan Tinggi Riau

Terbaik I

Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
tahun 2025 di tingkat Pengadilan Tinggi

Jakarta, 8 Desember 2025
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

BAMBANG MYANTO

4. Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Terbaik I atas pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) TA 2024 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 17 Desember 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

5. Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Terbaik II atas Penilaian Layanan Pengadilan (PTSP) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 17 Desember 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

6. Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Peringkat III Penerima Anugerah Pengadilan Tinggi dengan Jumlah Satker Peraih Anugerah Terbanyak dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dibacakan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada acara Refleksi Akhir Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2025 di Gedung Mahkamah Agung RI.

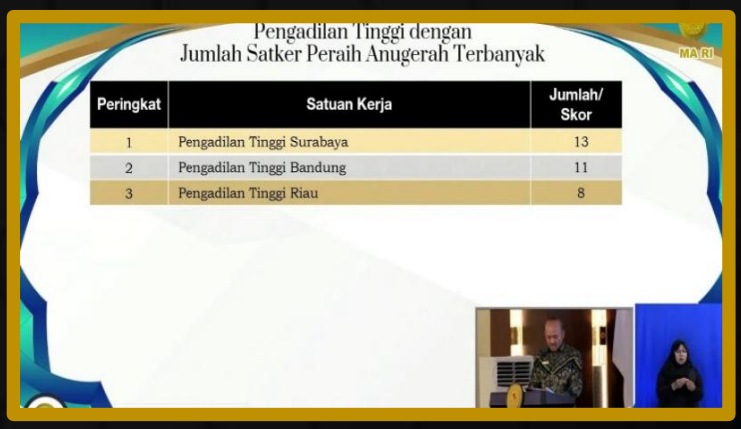

Peringkat	Satuan Kerja	Jumlah/ Skor
1	Pengadilan Tinggi Surabaya	13
2	Pengadilan Tinggi Bandung	11
3	Pengadilan Tinggi Riau	8

Penghargaan yang diterima Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Riau dari Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung RI

1. Pengadilan Negeri Bangkinang menerima penghargaan Predikat Unggul Sertifikasi Ampuh Tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 17 Desember 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Mahkamah Agung RI.

SERTIFIKAT
NOMOR 1692/DJU/SK.OTI.6/XII/2025
Komite Keputusan SertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan TanggUH (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025
menyatakan bahwa:
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
telah memenuhi standar AMPUH dengan predikat:
UNGGUL
Penilaian SertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) akan dilakukan kembali setiap 1 (satu) tahun.
Jakarta, 3 Desember 2025
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

2. Pengadilan Negeri Bengkalis menerima penghargaan atas prestasinya meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dari Mahkamah Agung RI, diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, pada tanggal 9 Desember 2025 di Gedung Mahkamah Agung RI.

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Piagam Penghargaan
Diberikan kepada :
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Jakarta, 09 Desember 2025
Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

3. Pengadilan Negeri Bengkalis menerima penghargaan Terbaik I Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 di Tingkat PN Kelas IB dan Kelas II, dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

PIAGAM
PENGHARGAAN
Diberikan kepada:
Pengadilan Negeri Bengkalis
Terbaik I

4. Pengadilan Negeri Bengkalis menerima penghargaan atas prestasinya Pengadilan Terbaik dalam dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, pada tanggal 17 Desember 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

5. Pengadilan Negeri Bengkalis menerima Penghargaan Peringkat II Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1001-2000, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dibacakan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada acara Refleksi Akhir Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2025 di Gedung Mahkamah Agung RI.

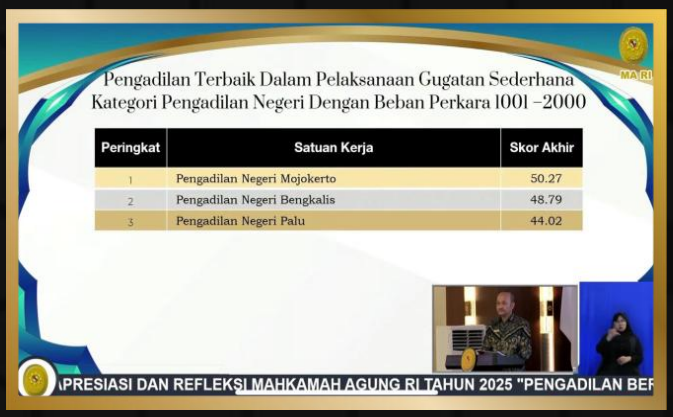

6. Pengadilan Negeri Bengkalis menerima Penghargaan Peringkat III Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaaan E-Berpadu Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1001-2000, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dibacakan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada acara Refleksi Akhir Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2025 di Gedung Mahkamah Agung RI.

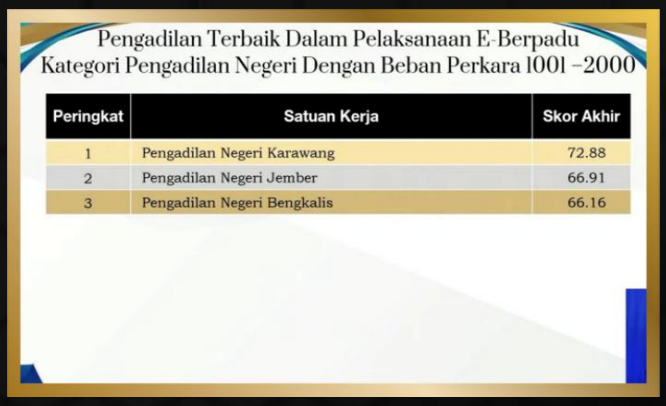

7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menerima penghargaan atas prestasinya meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dari Mahkamah Agung RI, diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, pada tanggal 9 Desember 2025 di Gedung Mahkamah Agung RI.

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada :

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

sebagai unit kerja pelayanan berpredikat meraih

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 09 Desember 2025

Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

8. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menerima penghargaan atas prestasinya Pengadilan Terbaik dalam dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, pada tanggal 17 Desember 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

9. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menerima penghargaan Predikat Unggul Sertifikasi Ampuh Tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 17 Desember 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Mahkamah Agung RI

SERTIFIKAT
NOMOR 1692/DJU/SK.OT1.6/XII/2025
Komite Keputusan SertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan TangguH (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025
menyatakan bahwa:
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
telah memenuhi standar AMPUH dengan predikat:
UNGGUL
Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) akan dilakukan kembali setiap 1 (satu) tahun.
Jakarta, 3 Desember 2025
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Bambang Myanto

10. Pengadilan Negeri Dumai menerima penghargaan Harapan I Penilaian Administrasi dan Keuangan Perkara Tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau di kantor Pengadilan Tinggi Riau.

PIAGAM
PENGHARGAAN
NOMOR 1693/DJU/SK.OT1.6/XII/2025
BerAKHLAK
Diberikan kepada:
Pengadilan Negeri Dumai
Harapan I
Penilaian Administrasi dan Keuangan Perkara
Tahun 2025
Jakarta, 8 Desember 2025
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
BAMBANG MYANTO

Penghargaan yang diterima Pengadilan Tinggi Riau dari Lintas Sektoral

1. **Penghargaan Satuan Kerja (kode satker 400492) dengan Transaksi Digipay Satu Terbanyak Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pekanbaru Periode Semester I TA. 2025,** dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara wilayah Pekanbaru, tanggal 5 Agustus 2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SERTIFIKAT
PENGHARGAAN
nomor: SRTF-333/KPN.0401/2025
DIBERIKAN KEPADA:
400492 - Pengadilan Tinggi Riau
"Satuan Kerja dengan Transaksi Digipay Satu Terbanyak Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pekanbaru Periode Semester I Tahun Anggaran 2025"
Pekanbaru, 05 Agustus 2025
KEPALA KPPN PEKANBARU

2. **Penghargaan Terbaik I Satuan Kerja dengan BMN kurang dari 5000 NUP, Kategori Pengamanana BMN TA. 2024,** dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang wilayah Pekanbaru, tanggal 7 Agustus 2025.

PIAGAM PENGHARGAAN
Diberikan kepada
Pengadilan Tinggi Riau
SATUAN KERJA DENGAN BMN KURANG DARI 5000 NUP
sebagai
TERBAIK I
KATEGORI PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

3. **Penghargaan Terbaik III Satuan Kerja (kode satker 400492) dengan Transaksi Digipay Satu Terbaik pada kegiatan "Treasury Awards semester II 2024 & evaluasi pelaksanaan anggaran s.d bulan Juni 2025,** dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara wilayah Pekanbaru, tanggal 17 juni 2025.

SERTIFIKAT
PENGHARGAAN
nomor: SRTF-285/KPN.0401/2025
TERBAIK KETIGA
DIBERIKAN KEPADA:
400492 -
PENGADILAN TINGGI RIAU
Satuan kerja dengan penggunaan digipay satu terbaik pada kegiatan "TREASURY AWARDS SEMESTER II 2024 & EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S.D BULAN JUNI 2025"
Pekanbaru, 17 Juni 2025
KEPALA KPPN PEKANBARU

4. **Penghargaan Satuan Kerja (kode satker 400492) dengan IKPA excellent (nilai 100) TA. 2024 pada kegiatan "Treasury Awards semester II 2024 & evaluasi pelaksanaan anggaran s.d bulan Juni 2025,** dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara wilayah Pekanbaru, tanggal 17 juni 2025.

SERTIFIKAT
PENGHARGAAN
nomor: SRTF-296/KPN.0401/2025
DIBERIKAN KEPADA:
400492 -
PENGADILAN TINGGI RIAU
Satuan kerja dengan IKPA EXCELLENT (nilai 100) tahun anggaran 2024 pada kegiatan "TREASURY AWARDS SEMESTER II 2024 & EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S.D BULAN JUNI 2025"
Pekanbaru, 17 Juni 2025
KEPALA KPPN PEKANBARU

5. **Penghargaan Satuan Kerja (kode satker 400493) dengan IKPA excellent (nilai 100) TA. 2024 pada kegiatan "Treasury Awards semester II 2024 & evaluasi pelaksanaan anggaran s.d bulan Juni 2025,** dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara wilayah Pekanbaru, tanggal 17 juni 2025.

SERTIFIKAT
PENGHARGAAN
nomor: SRTF-327/KPN.0401/2025
DIBERIKAN KEPADA:
400493 - PENGADILAN
TINGGI RIAU
Satuan kerja dengan IKPA EXCELLENT (nilai 100) tahun anggaran 2024 pada kegiatan "TREASURY AWARDS SEMESTER II 2024 & EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S.D BULAN JUNI 2025"
Pekanbaru, 17 Juni 2025
KEPALA KPPN PEKANBARU

Penghargaan yang diterima Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Riau dari Lintas Sektoral

1 Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 30 September 2025 menerima penghargaan sebagai Terbaik Pertama satuan kerja kode satker (09887417) dengan nilai IKPA Sempurna (100) Semester I Tahun 2025 dengan Kategori Pagu Kecil dibawah 5 Milyar dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :KEP-87/KPN.0403/2025

diberikan kepada :

PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
(098874)

sebagai

TERBAIK PERTAMA

KATEGORI CAPAIAN IKPA PAGU SEDANG (PAGU DIPA 1 MILIAR S.D. 8 MILIAR)
SEMESTER I TAHUN 2025

Rengat, 30 September 2025
Kepala KPPN Rengat

Nanang Heru Setyo Purdianto

2 Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 30 September 2025 menerima penghargaan sebagai Terbaik Pertama satuan kerja kode satker (099217) dengan nilai IKPA Sempurna (100) Semester I Tahun 2025 dengan Kategori Pagu Kecil dibawah 5 Milyar dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :KEP-87/KPN.0403/2025

diberikan kepada :

PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
(099217)

sebagai

TERBAIK PERTAMA

KATEGORI CAPAIAN IKPA PAGU KECIL (DI BAWAH 1 MILIYAR)
SEMESTER I TAHUN 2025

Rengat, 30 September 2025
Kepala KPPN Rengat

Nanang Heru Setyo Purdianto

3 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 30 September 2025 menerima penghargaan sebagai Terbaik Pertama satuan kerja kode satker (401908) dengan nilai IKPA Sempurna (100) Semester I Tahun 2025 dengan Kategori Pagu Sedang dibawah 8 Milyar dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :KEP-87/KPN.0403/2025

diberikan kepada :

PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
(401908)

sebagai

TERBAIK PERTAMA

KATEGORI CAPAIAN IKPA PAGU SEDANG (PAGU DIPA 1 MILIAR S.D. 8 MILIAR)
SEMESTER I TAHUN 2025

Rengat, 30 September 2025
Kepala KPPN Rengat

Nanang Heru Setyo Purdianto

4 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 30 September 2025 menerima penghargaan sebagai Terbaik Kedua satuan kerja kode satker (402016) dengan nilai IKPA Sempurna (100) Semester I Tahun 2025 dengan Kategori Pagu Sedang dibawah 8 Milyar dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 015/KPN.0403/PIAGAM/2025

diberikan kepada:

PENGADILAN NEGERI
RENGAT (098860)

sebagai

PERINGKAT KETIGA

KATEGORI IKPA PAGU KECIL DIBAWAH 5 MILYAR
DENGAN NILAI CAPAIAN SEBESAR 99,96

Rengat, 11 Juni 2025
Kepala KPPN Rengat

Nanang Heru Setyo Purdianto

5 Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 11 Juni 2025 menerima penghargaan sebagai Terbaik Ketiga satuan kerja kode satker (098860) dengan nilai IKPA 99,99 Kategori Pagu Kecil dibawah 5 Milyar dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.

6 Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 11 Juni 2025 menerima penghargaan sebagai Terbaik Ketiga satuan kerja kode satker (098860) dengan penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.

7 Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Maret 2025 menerima penghargaan sebagai satuan kerja kode satker (477261) dengan nilai IKPA Sempurna (100) TA 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai.

8 Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Maret 2025 menerima penghargaan sebagai Juara III satuan kerja kode satker (477262) dengan LPJ Bendahara Penerimaan Terbaik Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU i
KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI RIAU DARI BADILUM DAN MARI vi
PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI DARI BADILUM DAN MARI viii
PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI RIAU DARI LINTAS SEKTORAL..... xi
PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI DARI LINTAS SEKTORAL..... xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL..... xv
DAFTAR GRAFIK..... xv
DAFTAR GAMBAR xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 2
B. Tugas Pokok dan Fungsi 3
C. Struktur Organisasi..... 3
D. Isu Strategis..... 5
E. Sistematika Penyajian..... 7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029 9
B. Rencana Kinerja Tahun 2025..... 14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 18
1. Capaian Kinerja Periode Januari s.d Oktober (IKU lama)..... 18
2. Capaian Kinerja Periode Januari s.d Desember (IKU baru)..... 20
3. Realisasi Kinerja dibandingkan Tahun Sebelumnya..... 46
4. Realisasi Kinerja dibandingkan Target Jangka Menengah 47
5. Realisasi Kinerja dibandingkan Standar Nasional 48
6. Analisis Keberhasilan dan Kendala..... 52
7. Analisis Efisiensi Sumber Daya..... 54

B. Realisasi Anggaran..... 56
1. DIPA (01) BUA 56
2. DIPA (03) BADILUM..... 57
3. Biaya Proses 59

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan..... 61
B. Rekomendasi..... 63

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja (IKU Baru) Periode Januari-Desember 2025 4
Tabel 2. Capaian Kinerja (dengan IKU Lama) Periode Januari s.d Oktober 2025 6
Tabel 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Riau 3
Tabel 4. Uraian Tugas Jabatan di Pengadilan Tinggi Riau 4
Tabel 5. Isu Strategis 5
Tabel 6. Matriks Rancangan Renstra Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025-2029 (IKU lama) 12
Tabel 7. Matriks Kinerja dan Pendanaan pada Renstra Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025-2029 (IKU baru)) 13
Tabel 8. Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU lama) 14
Tabel 9. Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU baru) 14
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (menggunakan IKU lama, tanggal 2 Januari 2025) 15
Tabel 11. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (menggunakan IKU baru, tanggal 3 November 2025) 16
Tabel 12. Capaian Kinerja bulan Januari s.d Oktober 2025 (dengan IKU lama) 18
Tabel 13. Capaian Kinerja bulan Januari s.d Desember 20205 (dengan IKU baru) 20
Tabel 14. Rincian perkara putus tepat waktu tahun 2025 22
Tabel 15. Rincian perkara putus tepat waktu per bulan 22
Tabel 16. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2021-2025 23
Tabel 17. Rincian pengiriman salinan putusan tepat waktu tahun 2025 24
Tabel 18. Jumlah pengiriman salinan putusan tepat waktu tahun 2021-2025 25
Tabel 19. Jumlah putusan yang masuk ke Direktori Putusan Tahun 2025 25
Tabel 20. Jumlah putusan pengadilan yang diunggah Direktori Putusan tahun 2021-2025 26
Tabel 21. Rincian perkara yang diajukan e-Court per bulan tahun 2025 27
Tabel 22. Jumlah perkara yang diajukan e-Court tahun 2021-2025 28
Tabel 23. Rincian perkara yang diajukan e-Berpadu per bulan tahun 2025 29
Tabel 24. Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan tahun 2021-2025 32
Tabel 25. Rincian Nilai Ikpa DIPA (01) Tahun 2025 38
Tabel 26. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Tahun 2021-2025 38
Tabel 27. Rincian perhitungan nilai IKPA DIPA (03) Tahun 2025 39
Tabel 28. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Tahun 2021-2025 40
Tabel 29. NK Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2025 ... 41
Tabel 30. NK Perencanaan Anggaran DIPA (01) tahun 2024-2025 42
Tabel 31. Realisasi NK Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2024-2025 42
Tabel 32. NK Perencanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025 43
Tabel 33. Rincian perhitungan IPA 44
Tabel 34. Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 46
Tabel 35. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan capaian kinerja target jangka menengah 47
Tabel 36. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan capaian kinerja target standar nasional dan rata-rata 34 Pengadilan Tinggi 49
Tabel 38. Faktor Keberhasilan dan Program Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja 52
Tabel 39. Kendala dan solusi dalam pencapaian kinerja 53
Tabel 40. Efisiensi anggaran terhadap kinerja 54
Tabel 41. Rincian formasi SDM Pengadilan Tingkat Banding ... 55
Tabel 42. Efisiensi SDM terhadap kinerja 55
Tabel 43. Reliasasi DIPA (01) 56
Tabel 44. Realisasi DIPA (01) tahun 2021-2025 56
Tabel 45. Realisasi DIPA (03) 57
Tabel 46. Realisasi DIPA (03) Tahun 2021-2025 57
Tabel 47. Rincian anggaran pendukung capaian Tujuan dan Sasaran Strategis 58
Tabel 48. Penerimaan dan realisasi Biaya Proses Tahun 2025 . 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau 3
Gambar 2. Isu Strategis penerapan KUHP dan KUHAP baru, ... 6
Gambar 3. Visi. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja 9
Gambar 4. Framework Rencana Strategis 2025-2029 11
Gambar 5. Data perkara putus dari SIPP dan Evakip 22
Gambar 6. Realisasi kinerja sasaran 1-Indikator 2 di Evakip 24
Gambar 7. Realisasi jumlah putusan pada Direktori putusan dan Evalip 26
Gambar 8. Realisasi kinerja Sasaran 1-Indikator 4 di Evakip 28
Gambar 9. Realisasi kinerja Sasaran 1-Indikator di Evakip 30
Gambar 10. Realisasi survei indeks kepuasan layanan pengadilan di Sisuper dan Evakip 31
Gambar 11. IP ASN pada SIKEP 34
Gambar 12. Data IP ASN per Desember 2025 35
Gambar 13. Nilai IKPA DIPA (01) pada Omspan 38
Gambar 14. Nilai IKPA DIPA (03) pada Omspan 39
Gambar 15. NK Perencanaan Anggaran DIPA (01) di Monev Kemenkeu 41
Gambar 16. NK Perencanaan Anggaran DIPA (03) di Monev Kemenkeu 43
Gambar 17. Rincian Perhitungan IPA Tahun 2025 44
Gambar 18. Capaian Kinerja Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum 50
Gambar 19. Liputan Kompas TV Penyampaian Capaian Kinerja Tahun 2025 pada acara Refleksi Akhir tahun 51
Gambar 20. Aplikasi SATRIA pengembangan dari aplikasi Evakip 51
Gambar 21. Dialog Interaktif Prima (Pengadilan Tinggi Riau Menyapa) 52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Persentase realisasi perkara yang diajukan e-court tahun 2021-2025 28
Grafik 2. Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan tahun 2021-2025 33
Grafik 3.Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan tahun 2021-2025 38
Grafik 4. Realisasi IKPA DIPA (03) Tahun 2021-2025 40
Grafik 5. Pengukuran IPA pada aplikasi e-Sadewa 44
Grafik 6. Perbandingan realisasi DIPA (01) Tahun 2021-2025 .. 57
Grafik 7. Realisasi DIPA (03) Tahun 2021-2025 57

Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang
B. Tugas Pokok dan Fungsi
C. Struktur Organisasi
D. Isu strategis
E. Sistematika Penyajian

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Riau merupakan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru, yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding, yang membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Riau, yaitu Pekanbaru, Dumai, Bangkinang, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak Sri Indrapura, Pasir Pengaraian, Rengat, Tembilahan, dan Teluk Kuantan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Riau dituntut untuk senantiasa menerapkan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pengadilan Tinggi Riau berkewajiban menyelenggarakan akuntabilitas kinerja secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu wujud pelaksanaan akuntabilitas tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja, yang merupakan tahapan akhir dalam rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau selama Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja di Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 memuat pencapaian kinerja pelaksanaan rencana kinerja pada tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2025. Renstra Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK/RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK/RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung, serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK/RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Selama Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau telah diupayakan secara optimal, sehingga seluruh indikator kinerja mencapai target, bahkan sebagian besar melampaui target. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Riau terus berupaya melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan sehingga berhasil meraih berbagai prestasi. Capaian tersebut merupakan hasil dari upaya perbaikan kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan, disertai dengan komitmen untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja. Capaian tersebut disampaikan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik yang menyajikan informasi kinerja yang terukur serta pengungkapan yang memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Dengan demikian, laporan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Riau diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Tabel 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Riau

TUGAS POKOK	FUNGSI
Mengadili perkara pidana, perdata, dan tindak pidana korupsi di Tingkat banding	**Fungsi Mengadili** (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding.
	Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan Pembangunan
Mengadili di Tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.	**Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, dan Pegawai di daerah hukumnya serta tehadap jalannnya Peradilan Tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara di Tingkat	**Fungsi Nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
	Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, Keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau

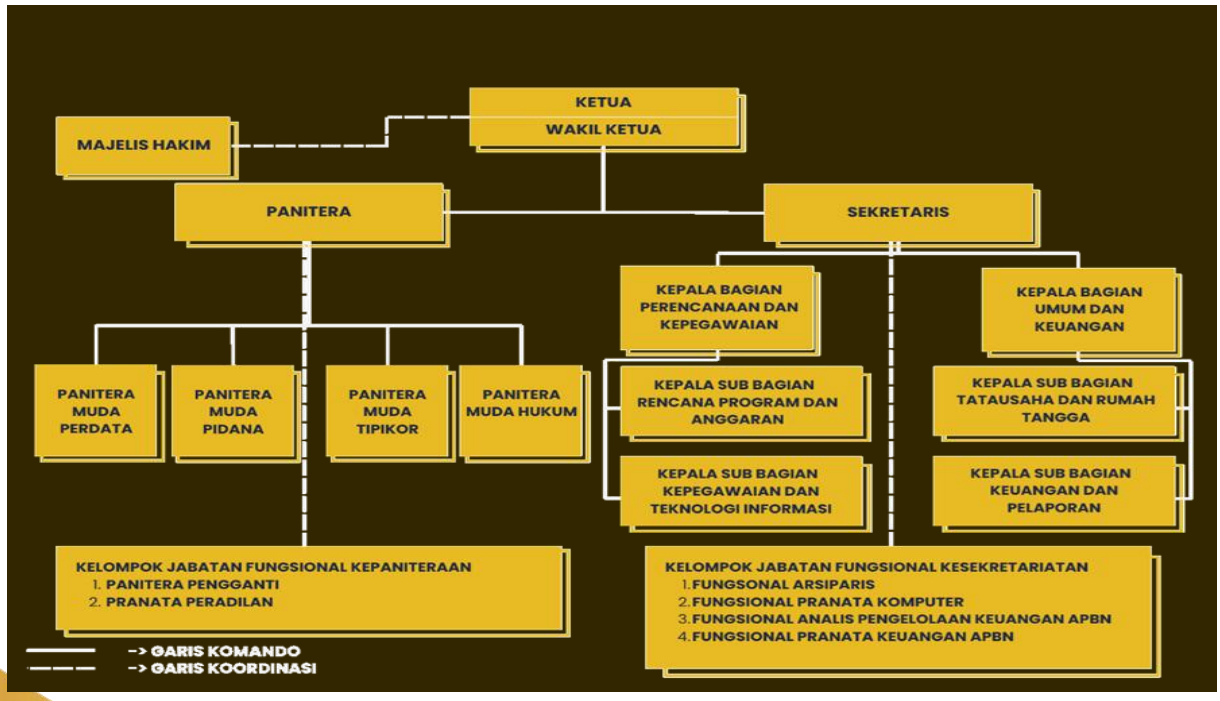

Tabel 4. Uraian Tugas Jabatan di Pengadilan Tinggi Riau

<table>
<tr><th colspan="3">URAIAN TUGAS</th></tr>
<tr><td colspan="3">KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.</td></tr>
<tr><td colspan="3">WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.</td></tr>
<tr><td colspan="3">HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>PANITERA mempunya tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.</td><td colspan="2">SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.</td></tr>
<tr><td>PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti

PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.</td><td>KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusanan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.</td><td>KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.</td></tr>
<tr><td>PANMUD TIPIKOR bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti

PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSIONAL ARSIPARIS bertugas melaksanakan pengelolaan arsip secara profesional agar arsip tertata, aman, dan mudah dimanfaatkan.</td><td>KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & IT bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

FUNGSIONAL ANALIS SDM bertugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur secara profesional agar terwujud SDM yang kompeten, berintegritas, dan berkinerja tinggi.

FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER bertugas melaksanakan pengelolaan, pengoperasian, dan pemanfaatan perangkat teknologi informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan</td><td>KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.</td></tr>
<tr><td>PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.</td><td>KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.</td><td>KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

FUNGSIONAL ANALIS KEUNGAN APBN bertugas melakukan analisis, pengelolaan, dan evaluasi di bidang keuangan negara untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan.</td></tr>
</table>

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selama kurun waktu tahun 2025, Pengadilan Tinggi Riau dihadapkan pada isu-isu strategis yang diselesaikan dengan berbagai strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5. Isu Strategis

No	Isu StrategiS	Permasalahan	Kebijakan/Strategi
1	Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara	Hasil penilaian EIS Badilum menunjukkan Pengadilan Tinggi Riau belum memperoleh penilaian terbaik dalam implementasi SIPP.	- Mengoptimalkan Tim Pengawasan SIPP serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terstruktur - Menindaklanjuti hasil pengawasan dan monev melalui perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi SIPP
		Harmonisasi penerapan KUHP dan KUHAP baru	- Meningkatkan pemahaman aparatur melalui kegiatan FGD dan Dialog Interaktif - Peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum
2	Penyelesaian perkara secara tepat waktu	Masih diperlukan peningkatan efektivitas penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	- Optimalisasi penerapan SOP Kepaniteraan - Penguatan pengendalian internal - Pemanfaatan sistem informasi penelusuran perkara secara berkelanjutan
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan	Masih diperlukan penguatan kualitas pelayanan peradilan agar memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.	- Pelaksanaan Program AMPUH secara konsisten, dan mempertahankan predikat Unggul. - Melakukan standarisasi pelayanan dan memastikan pelayanan telah sesuai standar pelayanan - Penguatan pengawasan melekat - Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pelayanan peradilan - Meningkatkan kualitas pelayanan PTSP melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi petugas, serta pemanfaatan teknologi informasi - Mendorong peningkatan inovasi pelayanan publik guna menciptakan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat -
4	Penguatan akses terhadap keadilan (access to justice)	Masih diperlukan penguatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.	- Mengoptimalkan penyelenggaraan mediasi melalui peningkatan peran mediator nonhakim dan program mediasi probono - Meningkatkan upaya diversi - Menguatkan penerapan keadilan restorative - Meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan
5	Penguatan integritas aparatur peradilan	Masih terdapat risiko terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku aparatur.	- Melaksanakan program penguatan Integritas internal - Melanjutkan program pembangunan zona Integritas mempertahankan WBK menuju WBBM - Membina satker tingkat pertama meraih WBK - Sosialisasi dan internalisasi kode etik - Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin.
6	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia	Masih diperlukan peningkatan kompetensi teknis dan nonteknis aparatur peradilan.	- Mengusulkan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan - Bimtek, FGD secara offline maupun online melalui program Dialog Interaktif Prima (Pengadilan Tinggi Riau Penyapa) - Briefing, Coaching secara berkala - Rapat Koordinasi dan Pembinaan secara berkala -

7	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan peradilan masih perlu ditingkatkan.	- Mengoptimalkan implementasi sistem peradilan berbasis elektronik - Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang teknologi informasi - Meningkatkan inovasi berbasis teknologi informasi baik dalam hal inovasi pelayanan publik, inovasi peningkatkan kinerja, maupun inovasi dalam penguatan Integritas
8	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja	Masih diperlukan penguatan kualitas penyusunan laporan kinerja dan keterbukaan informasi publik	- Melakukan penyempurnaan sistem pelaporan kinerja, - Penguatan evaluasi kinerja melalui aplikasi Evakip - Peningkatan publikasi informasi kinerja melalui aplikasi SATRIA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Riau)
9	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana	Masih diperlukan penataan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.	- Melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap dan terukur sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran
10	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan	Efektivitas pengawasan ditentukan oleh kualitas tindak lanjut atas temuan, bukan sekadar jumlah temuan.	- Memperkuat pembinaan dan pengawasan internal serta memastikan setiap temuan ditindaklanjuti secara efektif untuk peningkatan kinerja dan kepercayaan publik.

Gambar 2. Isu Strategis penerapan KUHP dan KUHAP baru, Pengadilan Tinggi Riau selenggarakan Dialog Interaktif

Ketua Pengadilan Tinggi Riau bersama Narasumber Tuaka Pidana

Ketua Pengadilan Tinggi Riau bersama Narasumber Pakar Hukum, Guru besar UI

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan beberapa hal meliputi :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Bab II
Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029
B. Rencana Kinerja Tahun 2025
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II
PERENCANAAN

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, serta indikator kinerja. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus sebagai dasar penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Riau telah menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun sebelumnya, yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024. Rancangan Renstra tersebut menggunakan IKU lama dengan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja.

Selanjutnya, setelah Pemerintah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Mahkamah Agung menyusun Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK/RA1.3/IX/2025. Seiring dengan itu, Mahkamah Agung juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK/RA 1.3/X/2025 tentang Penetapan IKU Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Berdasarkan Renstra dan IKU yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Riau kemudian menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029 pada tanggal 3 November 2025. Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan yang akan dicapai melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis, dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja.

Gambar 3. Visi. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja

VISI

Visi Pengadilan Tinggi Riau yaitu : **"**Terwujudnya Pengadilan Tinggi Riau yang Agung"

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan misi Pengadilan Tinggi Riau yang selaras dengan misi Mahkamah Agung, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Riau, ditetapkan dua tujuan utama yang diturunkan ke dalam sasaran strategis sebagai fokus capaian kinerja. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Tujuan 1**: "Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan" dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis, yaitu:
   a. **Sasaran Strategis 1**: "Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern." Sasaran ini secara langsung mendukung Tujuan 1 melalui peningkatan kinerja teknis peradilan, khususnya dalam penyelesaian perkara tepat waktu, keterbukaan putusan, serta pemanfaatan sistem peradilan berbasis elektronik (e-Court dan e-Berpadu), sehingga pelayanan peradilan menjadi lebih efektif, modern, dan akuntabel.
   b. **Sasaran Strategis 2**: "Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik." Sasaran ini juga mendukung Tujuan 1 dengan menekankan peningkatan kualitas layanan peradilan yang berdampak pada kepuasan pengguna layanan. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, peradilan diharapkan semakin dipandang adil, kredibel, dan dapat diandalkan dalam penegakan hukum.
2. **Tujuan 2**: "Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional" dijabarkan ke dalam: **Sasaran Strategis 3**: "Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional." Sasaran ini merupakan perwujudan langsung dari Tujuan 2, yang difokuskan pada penguatan tata kelola organisasi, peningkatan profesionalitas aparatur, serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, perencanaan, dan aset secara transparan dan akuntabel.

Setiap sasaran strategis diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Sasaran Strategis 1:

1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
1.2. Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
1.3. Persentase putusan yang diunggah ke direktori putusan
1.4. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court
1.5. Persentase perkara pidana tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu

2. Indikator kinerja Sasaran Strategis 2:

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

3. Indikator kinerja Sasaran Strategis 3:

3.1. Indeks Profesionalitas ASN Pengadilan Tinggi Riau
3.2. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
3.3. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3.6. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan 2 (dua) program Mahkamah Agung, yaitu :

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan guna mewujudkan proses peradilan yang pasti, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah **Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.** Program dan kegiatan ini dilaksanakan ini untuk mendukung tercapaianya **Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2.**

2. **Program Dukungan Manajemen**

   Program ini diarahkan untuk memperkuat dukungan tata kelola organisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau, dalam hal pengelolaan kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta barang milik negara. Kegiatan yang dilksanakan dalam program ini adalah

   a. **Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama**
   b. **Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung**

   Program dan kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tercapaianya **Sasaran Strategis 3.**

Gambar 4. Framework Rencana Strategis 2025-2029

Tabel 6. Matriks Rancangan Renstra Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025-2029 (IKU lama)

TUJUAN			SASARAN										STRATEGIS				
NO	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH		URAIAN		INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Dana (dalam juta rupiah)
							2025	2026	2027	2028	2029					
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	97%	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	97%	97%	97%	97%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelengaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 layanan	130.633
		97%			2	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	97%	97%	97%	97%					
		100%			3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		40%			4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40%	40%	40%	40%	40%					
		97%			5	Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	97%	97%	97%	97%	97%		Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana	5 layanan	1.835
2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tingkat banding tepat waktu	5.000 perkara	1.950
		100%			2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%			3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

Tabel 7. Matriks Kinerja dan Pendanaan pada Renstra Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025-2029 (IKU baru))

Program/ Kegiatan	Sasaran Program /Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								248.014	348.369	380.000	410.000	440.000
	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern											
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	97%	97%	97%	97%	97%					
	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.3. Persentase putusan yang diunggah ke direktori putusan	97%	97%	97%	97%	97%	97%					
	1.4. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
	1.5. Persentase perkara pidana tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	82%	50%	90%	90%	90%	90%					
	2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik											
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85					
Program Dukungan Manajemen/ Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama/ Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung								32.752	32.595	33.000	33.500	34.000
	3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional											
	3.1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	83,6	78	85	85	85	85					
	3.2. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98	98	98	98	98	98					
	3.3. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98	98	98	98	98	98					
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	80	80	80	80	80					
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	80	80	80	80	80					
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3	3	3	3	3	3					

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 memuat target capaian untuk seluruh indikator kinerja yang menjadi komitmen organisasi dan harus diwujudkan dalam periode tahun 2025. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024, berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) lama periode tahun sebelumnya.

Tabel 8. Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU lama)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 serta IKU baru, Pengadilan Tinggi Riau melakukan penyesuaian Rencana Kinerja Tahun 2025.

Tabel 9. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU baru)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 :	**Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan**			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%
		1.2	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		1.3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%
		1.4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	99%
		1.5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	50%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85

Tujuan 2 :	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80
		3.6	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Riau ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berlaku saat itu, dan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 awal tahun. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau dan Direktur Jenderal Badilum selaku atasan langsung.

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (menggunakan IKU lama, tanggal 2 Januari 2025)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	38%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 366.459.000
2.	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat banding dan Tingkat Pertama	Rp. 25.101.588.000
3.	Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 330.514.000

Selanjutnya, seiring dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru dan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan kembali pada tanggal 3 November 2025. Perjanjian Kinerja tersebut menetapkan target berdasarkan indikator kinerja yang baru. Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ini berbeda dengan anggaran pada perjanjian kinerja sebelumnya, karena telah dilakukan revisi anggaran berupa penambahan belanja pegawai dan efisiensi anggaran perjalanan dinas.

Tabel 11. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (menggunakan IKU baru, tanggal 3 November 2025)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 :	**Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan**			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%
		1.2	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		1.3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%
		1.4	Persentase perkara perdata pada tngkat banding yang menggunakan e-Court	99%
		1.5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	50%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85
Tujuan 2 :	**Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**			
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80
		3.6	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 487.139.000
2.	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat banding dan Tingkat Pertama	Rp. 32.265.623.000
3.	Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 248.014.000

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian Kinerja Periode Januari – Oktober 2025 (IKU lama)
2. Capaian Kinerja Periode Januari – Desember 2025 (IKU baru)
3. Realisasi Kinerja dibandingkan Tahun Sebelumnya
4. Capaian Kinerja dibandingkan Target Jangka Menengah
5. Capaian Kinerja dibandingkan Standar Nasional
6. Analisis Keberhasilan dan Kendala
7. Analisis Efisiensi Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai gambaran pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Sasaran dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029 diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pada awal tahun 2025, berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025–2029, Pengadilan Tinggi Riau menetapkan target kinerja melalui Perjanjian Kinerja tanggal 2 Januari 2025 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berlaku saat itu, dan pengukurannya dilakukan untuk periode Januari sampai dengan Oktober 2025. Selanjutnya, setelah Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029 dan IKU baru ditetapkan, Pengadilan Tinggi Riau menyesuaikan Renstra serta menetapkan kembali target kinerja dengan IKU baru pada tanggal 3 November 2025 sebagai dasar pengukuran kinerja. Oleh karena itu, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 disajikan dalam dua bagian, yaitu berdasarkan IKU lama (Januari–Oktober 2025) dan berdasarkan IKU baru (Januari–Desember 2025), sebagai berikut:

1. CAPAIAN KINERJA PERIODE JANUARI – OKTOBER 2025 (IKU LAMA)

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan pada awal tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja, dengan capaian periode Januari s.d Oktober 2025 sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian Kinerja bulan Januari s.d Oktober 2025 (dengan IKU lama)

CAPAIAN KINERJA BULAN JANUARI s.d. OKTOBER TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	35,6%	89%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	98,7%	101,8%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			**99,4%**
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadiian Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadiian Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadiian Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			**100,0%**
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2			**99,7%**

Analisis Capaian Kinerja
Periode Januari s.d Oktober 2025 (IKU lama)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja periode Januari sampai dengan Oktober 2025 menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) lama, secara umum kinerja Pengadilan Tinggi Riau menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian Sasaran Strategis 1 sebesar 99,4% dan Sasaran Strategis 2 sebesar 100,0%, dengan rata-rata capaian gabungan Sasaran Strategis 1 dan 2 mencapai 99,7%. Capaian tersebut berhasil diraih dalam periode pengukuran yang belum mencakup satu tahun penuh kinerja, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif sejak awal tahun. Secara umum, target kinerja yang ditetapkan pada periode pelaporan telah tercapai dan sebagian indikator bahkan melampaui target.

1. **Sasaran Strategis** 1, yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, terdapat lima indikator kinerja yang diukur.
   - Indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu masing-masing memiliki target sebesar 97%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 103,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian perkara, baik perdata maupun pidana, telah melampaui target yang ditetapkan.
   - Sementara itu, indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu memiliki target 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,0%, yang menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana khusus telah sepenuhnya memenuhi standar waktu yang ditetapkan.
   - Adapun indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditetapkan dengan target sebesar 40%, dengan realisasi 35,6%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 89%. Capaian ini menunjukkan bahwa indikator tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya perkara yang diajukan kasasi oleh para pihak, yang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh karakteristik perkara, kepentingan hukum para pihak, serta pertimbangan subjektif pihak berperkara, sehingga tidak sepenuhnya berada dalam kendali pengadilan
   - Selanjutnya, indikator Indeks Persepsi Stakeholder terhadap Layanan Peradilan memiliki target sebesar 97% dan terealisasi 98,7%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,8%, yang mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan peradilan yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

   Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1 mencapai 99,4%, yang menunjukkan bahwa sasaran strategis ini telah tercapai dengan sangat baik, meskipun masih terdapat satu indikator yang perlu terus didorong peningkatannya.

2. **Sasaran Strategis 2**, yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian yang optimal. Indikator persentase salinan putusan perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu masing-masing ditetapkan dengan target 100% dan seluruhnya terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja masing-masing indikator mencapai 100,0%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi pengiriman salinan putusan telah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.Dengan demikian, rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2 sebesar 100,0%, yang menegaskan bahwa sasaran strategis ini telah tercapai sepenuhnya.

Jika dilihat dari periode pengukuran yang baru mencakup Januari sampai dengan Oktober 2025 (belum satu tahun penuh), capaian ini semakin menunjukkan kinerja yang sangat positif. Secara agregat, rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2 mencapai 99,7%, yang menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Riau berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

2. CAPAIAN KINERJA PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025 (IKU BARU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada akhir tahun, setelah ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, terdiri atas 2 (dua) tujuan,3 (tiga) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja. Capaian kinerja sasaran dan indikator tersebut periode Januari s.d Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Kinerja bulan Januari s.d Desember 20205 (dengan IKU baru)

CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 :	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkeadllan, Setara dan Berkedaulatan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	100%	103,1%
		1.2	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%
		1.3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	100%	103,1%
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%	100%	101%
		1.5	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	50%	52%	104%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 :			102,2%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,96	102,9%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			102,9%
Tujuan 2 :	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78	81,58	104,6%
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) BUA	98	100	102%
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) BADILUM	98	100	102%
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) BUA	80	85	106,3%
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) BADILUM	80	85	106,3%
		3.6	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3	3,2	106,7%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 :			104,6%

Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1, 2,dan 3 :

103,2%

Analisis Capaian Kinerja
Periode Januari s.d Desember 2025 (IKU Baru)

TUJUAN 1 :

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

SASARAN STRATEGIS 1 :

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	100%	103,1%
2	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%
3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	100%	103,1%
4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	99%	100%	101%
5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	50%	52%	104%
	Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			**102,2%**

Sasaran Strategis 1 - Indikator 1
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator kinerja "Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu" merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Perkara yang menjadi objek pengukuran di Pengadilan Tinggi Riau meliputi perkara perdata, pidana biasa, pidana anak, dan pidana tindak pidana korupsi (tipikor).

Ketentuan mengenai penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan, yang menetapkan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara pada tingkat banding. Khusus untuk perkara tipikor, ketentuan waktu penyelesaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan batas waktu maksimal 60 (enam puluh) hari.

Jumlah penyelesaian perkara dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding Mahkamah Agung RI, sedangkan pengukuran kinerjanya dilakukan melalui aplikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau. Berdasarkan data pada aplikasi SIPP, jumlah perkara perdata, pidana biasa, pidana anak, dan tipikor yang diputus pada tahun 2025 sebanyak 1.203 perkara. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi Evakip, seluruh perkara tersebut diselesaikan tepat waktu, yaitu tidak melebihi 3 (tiga) bulan untuk perkara perdata dan pidana, serta tidak melebihi 60 (enam puluh) hari untuk perkara tipikor. Dengan demikian, realisasi indikator ini mencapai **100%**. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 97%, maka capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar **103,1%.**

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah perkara yang diputus tepat waktu selama satu tahun, dan per bulan.

Tabel 14. Rincian perkara putus tepat waktu tahun 2025

No	Perkara	Sisa Th. 2024	Masuk Th. 2025	Jumlah Beban	Putus Th. 2025	Putus Tepat Waktu	Persentase Perkara Putus Tepat Waktu
1	Perdata	15	224	239	225	225	100%
2	Pidana biasa	86	892	978	930	930	100%
3	Pidana anak	1	22	23	23	23	100%
4	Tipikor	7	18	25	25	25	100%
	Jumlah	109	1.156	1.265	1.203	1.203	100%

Tabel 15. Rincian perkara putus tepat waktu per bulan

Tahun 2025	Perkara				Jumlah Putus	Jumlah Putus Tepat Waktu	Persentase Putus Tepat Waktu
Bulan	Perdata	Pidana Biasa	Pidana Anak	Tipikor			
Januari	13	106	1	6	126	126	100%
Februari	22	49	2	2	75	75	100%
Maret	15	72	3	1	91	91	100%
April	13	62	2	2	79	79	100%
Mei	19	53	3	3	78	78	100%
Juni	12	76	2	0	90	90	100%
Juli	24	91	2	1	118	118	100%
Agustus	15	72	1	2	90	90	100%
September	29	122	1	1	153	153	100%
Oktober	21	67	1	0	89	89	100%
November	17	65	3	1	86	86	100%
Desember	25	95	2	6	128	128	100%
	225	930	23	25	1.203	1.203	100%

Adapun gambar di bawah ini menunjukkan perhitungan perkara yang diputus secara sistematis pada SIPP dan Evakip.

Gambar 5. Data perkara putus dari SIPP dan Evakip

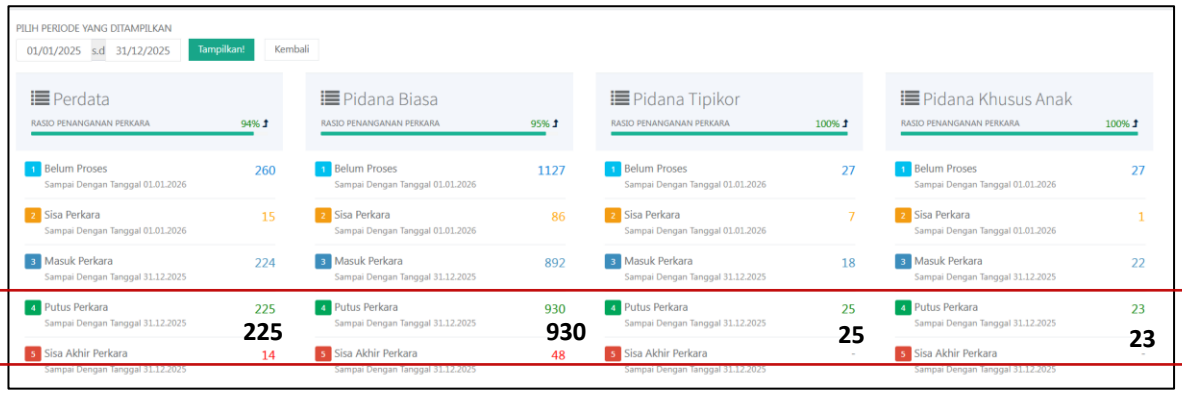

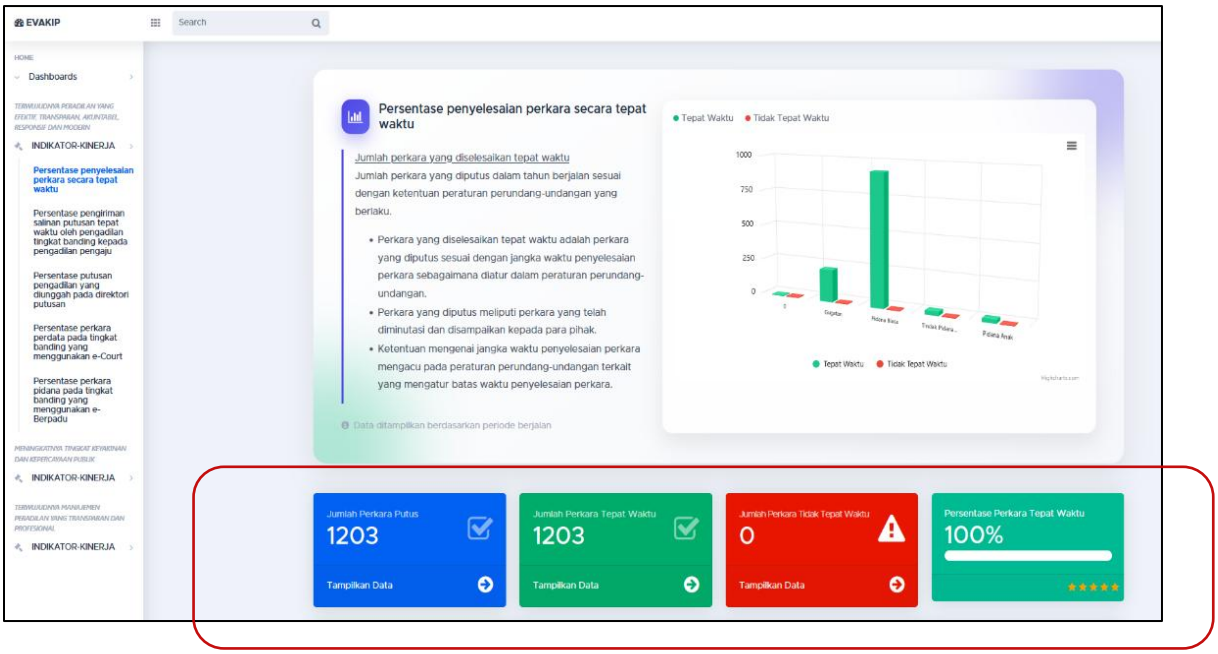

Realisasi indikator kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu selama lima tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2021 sampai dengan 2025, secara konsisten mencapai **100%**. Seluruh perkara yang diputus, baik perkara perdata, pidana biasa, pidana anak, maupun tipikor, dapat diselesaikan tepat waktu. Rincian penyelesaian perkara tepat waktu selama lima tahun tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2021-2025

Tahun	Perkara Putus				Jumlah Putus	Jumlah Putus Tepat Waktu	Persentase Putus Tepat Waktu
	Perdata	Pidana Biasa	Pidana Anak	Tipikor			
2025	225	930	23	25	1203	1203	100%
2024	211	868	28	18	1125	1125	100%
2023	195	706	24	35	960	960	100%
2022	259	723	30	33	1045	1045	100%
2021	256	689	28	38	1011	1011	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 1, yaitu *Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu*, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2025 tergolong sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2021 hingga 2025, capaian indikator ini secara konsisten mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Riau dalam pengelolaan dan penyelesaian perkara telah berjalan secara efektif, stabil, dan berkelanjutan.

Capaian tersebut secara langsung mendukung terwujudnya Tujuan 1, yaitu Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan, serta menegaskan bahwa Sasaran Strategis 1, yaitu Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern, telah tercapai secara optimal.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu yang secara konsisten mencapai 100% antara lain meliputi :

1. Optimalisasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Riau sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 1239/KPT.W4.U/SK.HK1.2.5/IX/2025
2. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Penerapan manajemen perkara yang efektif
4. Adanya komitmen dan pengawasan berkelanjutan dari seluruh aparatur peradilan.

Sasaran Strategis 1 - Indikator 2
Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

Indikator kinerja “Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju” merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara yang dikirimkan tepat waktu kepada pengadilan pengaju dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Pengiriman salinan putusan dilakukan melalui dua metode, yaitu secara elektronik dan melalui pihak ketiga, dengan ketentuan penghitungan kinerja sebagai berikut:

a. Pengiriman secara elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai dengan salinan putusan diunggah melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan);
b. Pengiriman melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai dengan salinan putusan dikirimkan kepada pengadilan pengaju.

Pelaksanaan pengiriman salinan putusan mengacu pada SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2011. Untuk pengiriman melalui pihak ketiga, jangka waktu yang ditetapkan adalah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Sementara itu, pengiriman secara elektronik diatur dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 untuk perkara perdata dan SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 untuk perkara pidana, yang mewajibkan pengiriman dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal putusan.

Pada tahun 2025, terdapat 1.203 perkara yang telah diputus. Seluruh perkara tersebut telah dikirimkan salinan putusannya kepada pengadilan pengaju secara elektronik tepat waktu, yaitu pada hari yang sama dengan tanggal putusan. Dengan demikian, realisasi indikator ini mencapai 100% dan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja yang diperoleh juga sebesar 100%. Pengukuran realisasi indikator ini dilakukan secara sistematis melalui aplikasi pengukuran kinerja Evakip Pengadilan Tinggi Riau.

Rincian data pengiriman salinan putusan yang dilakukan tepat waktu dan perhitungan realisasi kinerja melalui Evakip disajikan dalam tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 17. Rincian pengiriman salinan putusan tepat waktu tahun 2025

No	Perkara	Sisa Th. 2024	Masuk Th. 2025	Jumlah Beban	Putus Th. 2025	Jumlah pengiriman salinan putusan	Jumlah pengiriman salinan putusan tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu
1	Perdata	15	224	239	225	225	225	100%
2	Pidana biasa	86	892	978	930	930	930	100%
3	Pidana anak	1	22	23	23	23	23	100%
4	Tipikor	7	18	25	25	25	25	100%
	Jumlah	109	1.156	1.265	1.203	1.203	1.203	100%

Gambar 6. Realisasi kinerja sasaran 1-Indikator 2 di Evakip

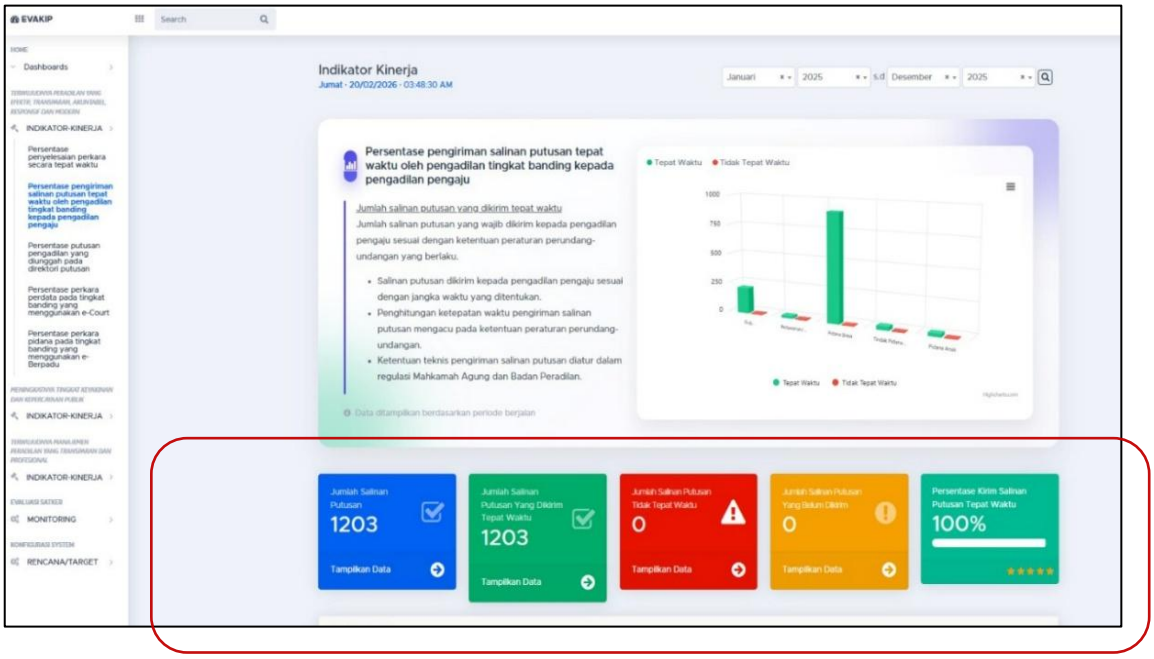

Selanjutnya, realisasi indikator kinerja pengiriman salinan putusan secara tepat waktu selama lima tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2021 sampai dengan 2025, secara konsisten mencapai 100%. Seluruh perkara yang diputus, baik perkara perdata, pidana biasa, pidana anak, maupun tipikor, telah dikirimkan salinan putusannya tepat waktu, baik melalui metode elektronik maupun melalui pihak ketiga. Rincian pengiriman salinan putusan tepat waktu selama lima tahun tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 18. Jumlah pengiriman salinan putusan tepat waktu tahun 2021-2025

Tahun	Perkara				Jumlah Perkara Putus	Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu
	Perdata	Pidana Biasa	Pidana Anak	Tipikor			
2025	225	930	23	25	1203	1203	100%
2024	211	868	28	18	1125	1125	100%
2023	195	706	24	35	960	960	100%
2022	259	723	30	33	1045	1045	100%
2021	256	689	28	38	1011	1011	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 2, yaitu *Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju*, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2025 berada pada kategori sangat baik dan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut juga menunjukkan konsistensi kinerja yang tinggi, karena selama lima tahun berturut-turut, sejak tahun 2021 sampai dengan 2025, realisasi indikator ini secara konsisten mencapai **100%**. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem, prosedur, serta kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Riau dalam pengelolaan dan pengiriman salinan putusan telah berjalan secara efektif, stabil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, capaian indikator ini secara langsung berkontribusi terhadap terwujudnya Sasaran Strategis 1, Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, dan pencapaian Tujuan 1, Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui SIP dalam pengiriman salinan putusan secara elektronik
2. Penerapan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku
3. Komitmen dan disiplin aparatur kepaniteraan dalam memproses putusan tepat waktu
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dengan dukungan pimpinan dan manajemen.

Sasaran Strategis 1 - Indikator 3
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan

Indikator kinerja "Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan" adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan.

Pada tahun 2025, dari 1.203 perkara yang diputus, seluruh putusan telah diunggah ke dalam Direktori Putusan. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja ini mencapai **100%**. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 97%, maka capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar **103,1%**. Jumlah putusan yang masuk ke direktori putusan dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Jumlah putusan yang masuk ke Direktori Putusan Tahun 2025

No	Perkara	Sisa Th. 2024	Masuk Th. 2025	Jumlah Beban	Putus Th. 2025	Jumlah putusan masuk ke direktori putusan	Persentase putusan yang masuk ke direktori putusan
1	Perdata	15	224	239	225	225	100%
2	Pidana biasa	86	892	978	930	930	100%
3	Pidana anak	1	22	23	23	23	100%
4	Tipikor	7	18	25	25	25	100%
	Jumlah	109	1.156	1.265	1.203	1.203	100%

Realisasi jumlah putusan yang diupload tahun 2025 pada Direktori Putusan dan pada aplikasi Evakip dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 7. Realisasi jumlah putusan pada Direktori putusan dan Evalip

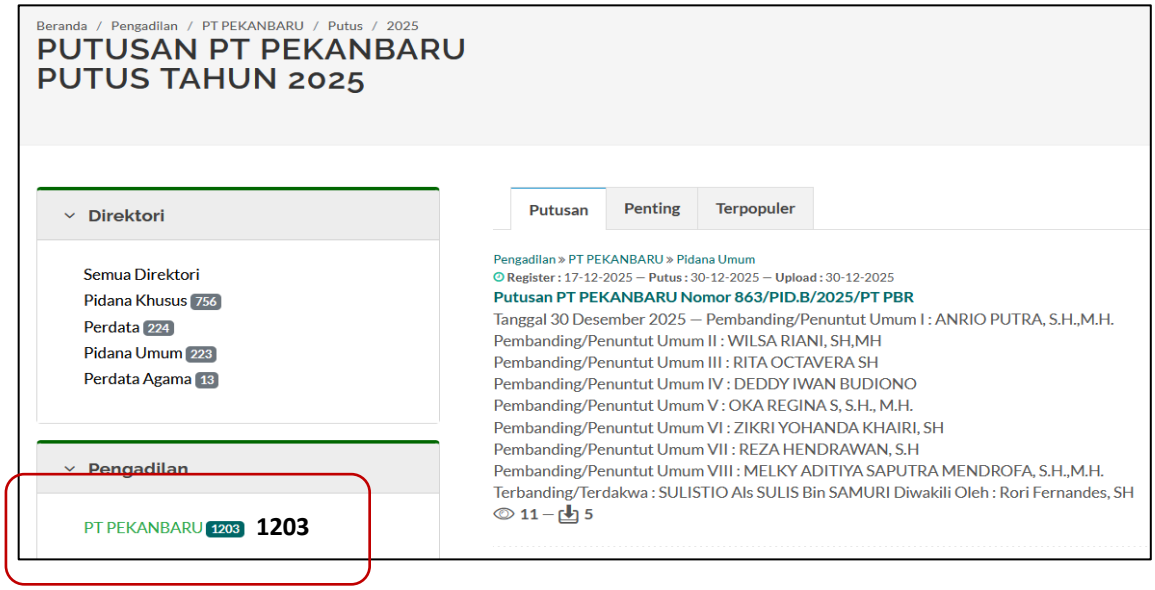

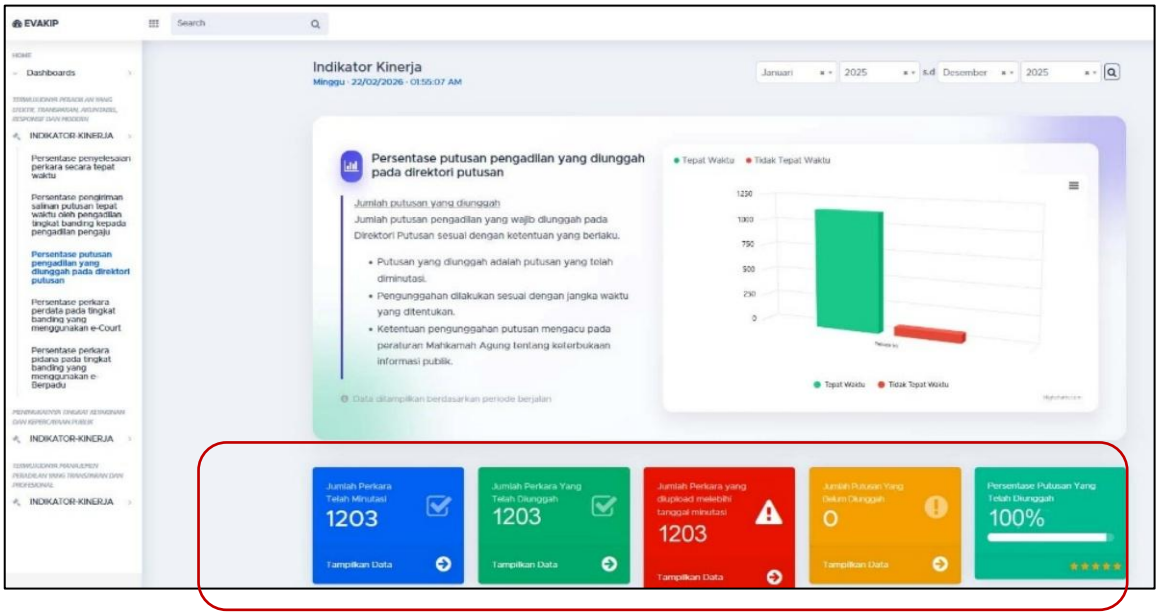

Realisasi indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan selama lima tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2021 sampai dengan 2025, secara konsisten mencapai **100%**. Seluruh perkara yang diputus telah diunggah pada direktori putusan. Rincian pengiriman salinan putusan tepat waktu selama lima tahun tersebut disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 20. Jumlah putusan pengadilan yang diunggah Direktori Putusan tahun 2021-2025

Tahun	Perkara				Jumlah Perkara Putus	Jumlah Putusan yang diunggah di Direktori Putusan	Persentase Putusan yang diunggah di Direktori Putusan
	Perdata	Pidana Biasa	Pidana Anak	Tipikor			
2025	225	930	23	25	1203	1203	100%
2024	211	868	28	18	1125	1125	100%
2023	195	706	24	35	960	960	100%
2022	259	723	30	33	1045	1045	100%
2021	256	689	28	38	1011	1011	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 3, yaitu *Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan*, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target. Dari 1.203 perkara yang telah diminutasi, seluruh putusan berhasil diunggah ke dalam Direktori Putusan.

Capaian ini tidak hanya menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban publikasi putusan, tetapi juga mencerminkan konsistensi kinerja yang berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi indikator yang selama lima tahun berturut-turut (2021–2025) secara konsisten mencapai 100%. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian Indikator 3 pada Sasaran Strategis 1 ini secara nyata mendukung tercapainya Sasaran Strategis 3, khususnya dalam aspek peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan peradilan berbasis teknologi informasi, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan 1, yaitu Terwujudnya peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:
1. Komitmen dan kedisiplinan aparatur dalam memenuhi kewajiban publikasi putusan secara tepat waktu
2. Pemanfaatan sistem informasi peradilan secara konsisten dan terintegrasi
3. Pengawasan dan monitoring kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan

Sasaran Strategis 1 - Indikator 4
Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court

Indikator kinerja **"**Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court**"** merupakan perbandingan antara jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan melalui e-Court dengan jumlah seluruh perkara perdata tingkat banding yang diajukan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan e-Court dalam pengajuan perkara perdata pada tingkat banding.

Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan melalui upaya hukum banding. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding mencakup perkara yang diajukan secara elektronik melalui e-Court maupun yang diajukan secara konvensional. Penerapan e-Court berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Pada tahun 2025, jumlah perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Riau tercatat sebanyak 224 perkara. Seluruh perkara tersebut diajukan melalui aplikasi e-Court. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja ini mencapai **100%**, yang pengukurannya dilakukan melalui aplikasi Evakip. Jika dibandingkan dengan target sebesar 99%, maka capaian kinerja yang diperoleh mencapai **101%.** Rincian jumlah perkara perdata yang diajukan melalui e-Court setiap bulan pada tahun 2025 serta tampilan realisasi indikator pada Evakip disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 21. Rincian perkara yang diajukan e-Court per bulan tahun 2025

Tahun 2025 Bulan	Jumlah Perkara Perdata diajukan	e-Court	Non e-Court	Presentase perkara Perdata diajukan e-Court
Januari	24	24	0	100%
Februari	10	10	0	100%
Maret	18	18	0	100%
April	15	15	0	100%
Mei	14	14	0	100%
Juni	17	17	0	100%
Juli	16	16	0	100%
Agustus	24	24	0	100%
September	28	28	0	100%
Oktober	15	15	0	100%
November	23	23	0	100%
Desember	20	20	0	100%
Jumlah	**224**	**224**	**-**	**100%**

Gambar 8. Realisasi kinerja Sasaran 1-Indikator 4 di Evakip

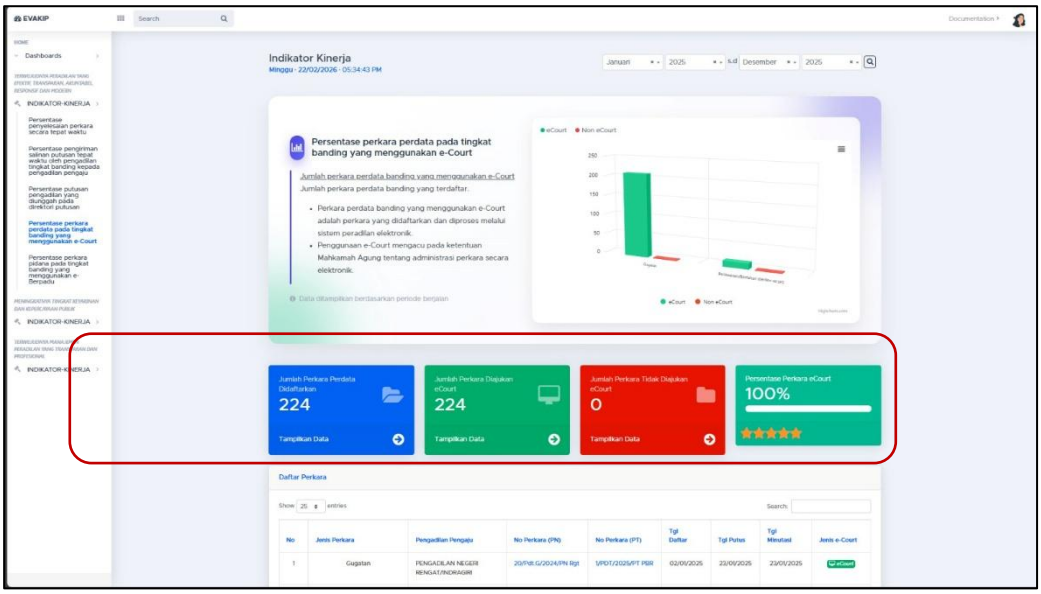

Penggunaan e-Court di Pengadilan Tinggi Riau pada 5 (lima) tahun kebelakang yaitu tahun 2021-2025 menunjukkan keberhasilan nyata dalam mendorong transformasi digital layanan peradilan. Persentase realisasi pengajuan perkara perdata melalui e-Court meningkat konsisten dari **13% pada tahun 2021**, menjadi **29% (2022)**, **33% (2023)**, melonjak **ke 83% (2024),** dan akhirnya mencapai **100% pada tahun 2025**, di mana seluruh perkara perdata telah diajukan secara elektronik. Realisasi perkara perdata yang diajukan e-court dari tahun 2021-2025 pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 22. Jumlah perkara yang diajukan e-Court tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Perkara Perdata diajukan	e-Court	Non e-Court	Presentase perkara Perdata diajukan e-Court
2025	224	224	0	100%
2024	216	180	36	83%
2023	185	61	124	33%
2022	248	73	175	29%
2021	265	34	231	13%

Grafik 1. Persentase realisasi perkara yang diajukan e-court tahun 2021-2025

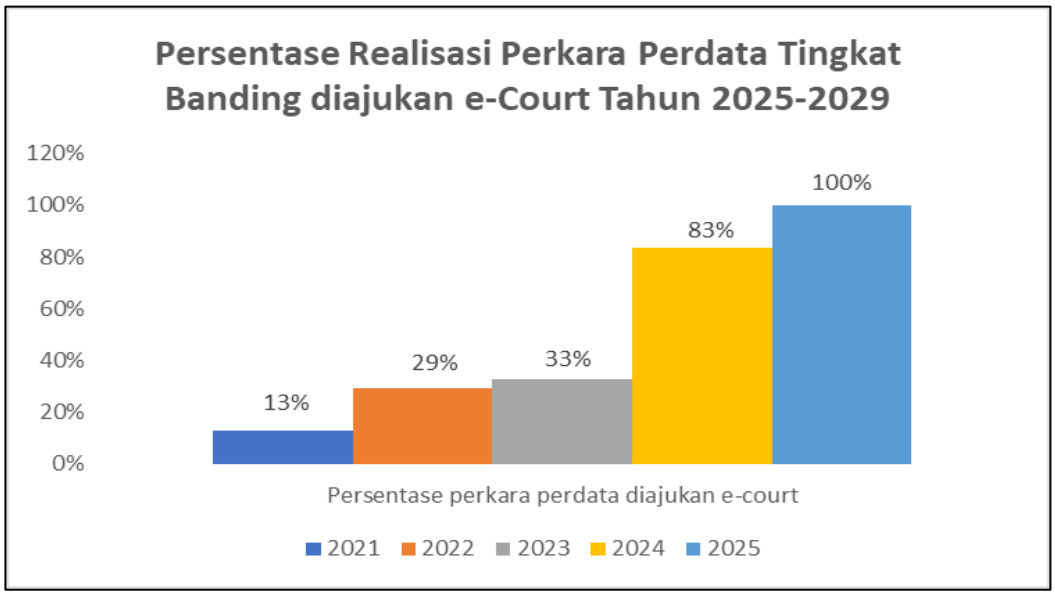

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 4, yaitu *Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court*, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada Tahun 2025 berada pada kategori sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pada tahun berjalan, tetapi juga menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja selama periode 2021–2025, yang menegaskan bahwa implementasi layanan peradilan berbasis elektronik telah berjalan efektif, stabil, dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem, prosedur, dan dukungan sumber daya dalam pemanfaatan e-Court telah terkelola secara optimal. Dengan demikian, capaian Indikator 4 secara langsung mendukung terwujudnya Sasaran Strategis 1 serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan 1 dalam rangka peningkatan kualitas layanan peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Keberhasilan pencapaian Indikator 4 didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Konsistensi implementasi kebijakan e-Court sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.
2. Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam mendorong pemanfaatan layanan e-Court secara menyeluruh.
3. Kesiapan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-Court
4. Peningkatan kapasitas aparatur dan pemahaman para pengguna layanan terhadap prosedur peradilan elektronik.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap implementasi e-Court.

Sasaran Strategis 1 - Indikator 5
Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu

Indikator kinerja "Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu" adalah perbandingan jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu dengan jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan.

Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding. Sedangkan jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar hukum e-Berpadu adalah Perma No. 8 Tahun 2022 dan SK KMA No. 365/KMA/SK/SK/XII/2022.

Pada tahun 2025, jumlah perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Riau tercatat sebanyak 932 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 486 perkara diajukan melalui aplikasi e-Berpadu, sedangkan 446 perkara lainnya masih diajukan secara konvensional. Dengan demikian, persentase perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu mencapai **52%.** Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan secara sistematis melalui aplikasi Evakip. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 50%, maka capaian kinerja yang diperoleh mencapai **104%.**

Rincian jumlah perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu setiap bulan pada tahun disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Rincian perkara yang diajukan e-Berpadu per bulan tahun 2025

Bulan	Pengajuan Perkara Pidana Tingkat Banding			
Tahun 2025	e-Berpadu	Non e-Berpadu	Jumlah Pengajuan Pidana	Presentase perkara Pidana diajukan e-Berpadu
Januari	0	54	54	0%
Februari	1	73	74	1%
Maret	0	72	72	0%
April	1	60	61	2%
Mei	0	75	75	0%
Juni	0	68	68	0%
Juli	53	22	75	71%
Agustus	131	19	150	87%
September	53	2	55	96%
Oktober	60	1	61	98%
November	98	0	98	100%
Desember	89	0	89	100%
Jumlah	**486**	**446**	**932**	**52%**

Gambar 9. Realisasi kinerja Sasaran 1-Indikator di Evakip

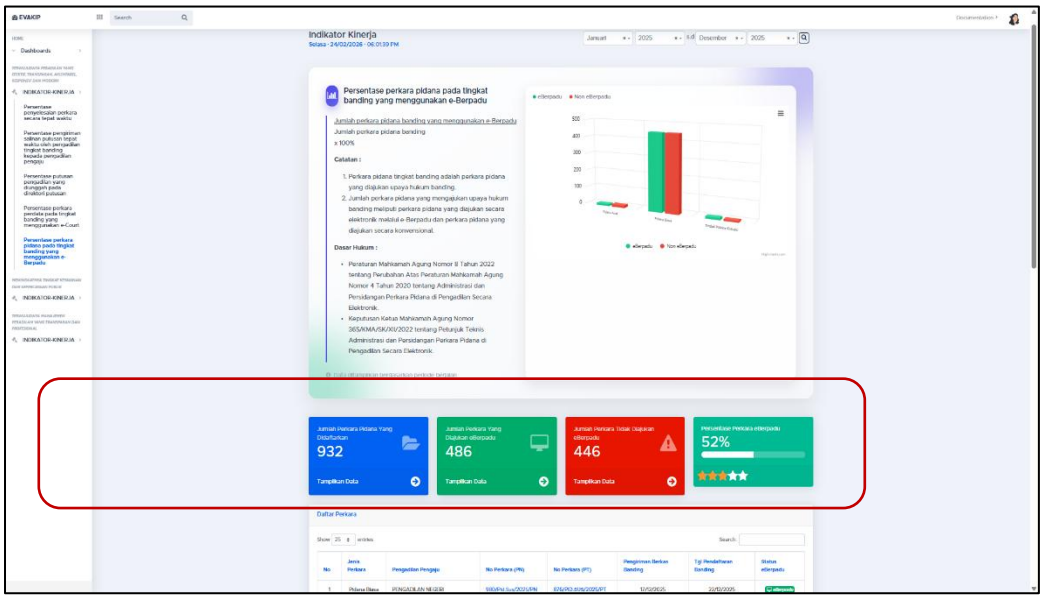

Implementasi pengajuan perkara pidana melalui e-Berpadu di Pengadilan Tinggi Riau mulai dilaksanakan secara efektif sejak bulan Juli 2025. Pada tahun-tahun sebelumnya, mekanisme ini belum diterapkan secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun e-Berpadu baru diimplementasikan secara efektif pada semester II tahun 2025, tingkat adopsinya telah menunjukkan hasil yang positif dan melampaui target yang ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur Pengadilan Tinggi Riau dalam mendorong digitalisasi proses peradilan.
2. Dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta integrasi sistem aplikasi pendukung.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui aplikasi Evakip untuk memastikan capaian indikator tetap terjaga.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Masa transisi implementasi e-Berpadu pada tahun 2025 yang baru berjalan efektif sejak semester II, sehingga belum seluruh satuan kerja dan pemangku kepentingan sepenuhnya beradaptasi dengan mekanisme baru.
2. Masih terbatas pemahaman dan kesiapan sebagian aparatur serta pengguna layanan terhadap penggunaan aplikasi e-Berpadu, yang berdampak pada masih digunakannya mekanisme pengajuan perkara secara konvensional.

TUJUAN 1 :

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,96	102,9%
	Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			**102,9%**

Sasaran Strategis 2 - Indikator 1
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator kinerja "Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan" adalah indeks yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) Badilum dan Evakip. Dari hasil survey, pada tahun 2025 realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan melalui survei terhadap 70 responden adalah sebesar **3,96.** Dengan target 3,85 maka capaian kinerja indikator ini sebesar **102,9%.** Gambar hasil survey Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan pada aplikasi Sisuper dan Evakip dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 10. Realisasi survei indeks kepuasan layanan pengadilan di Sisuper dan Evakip

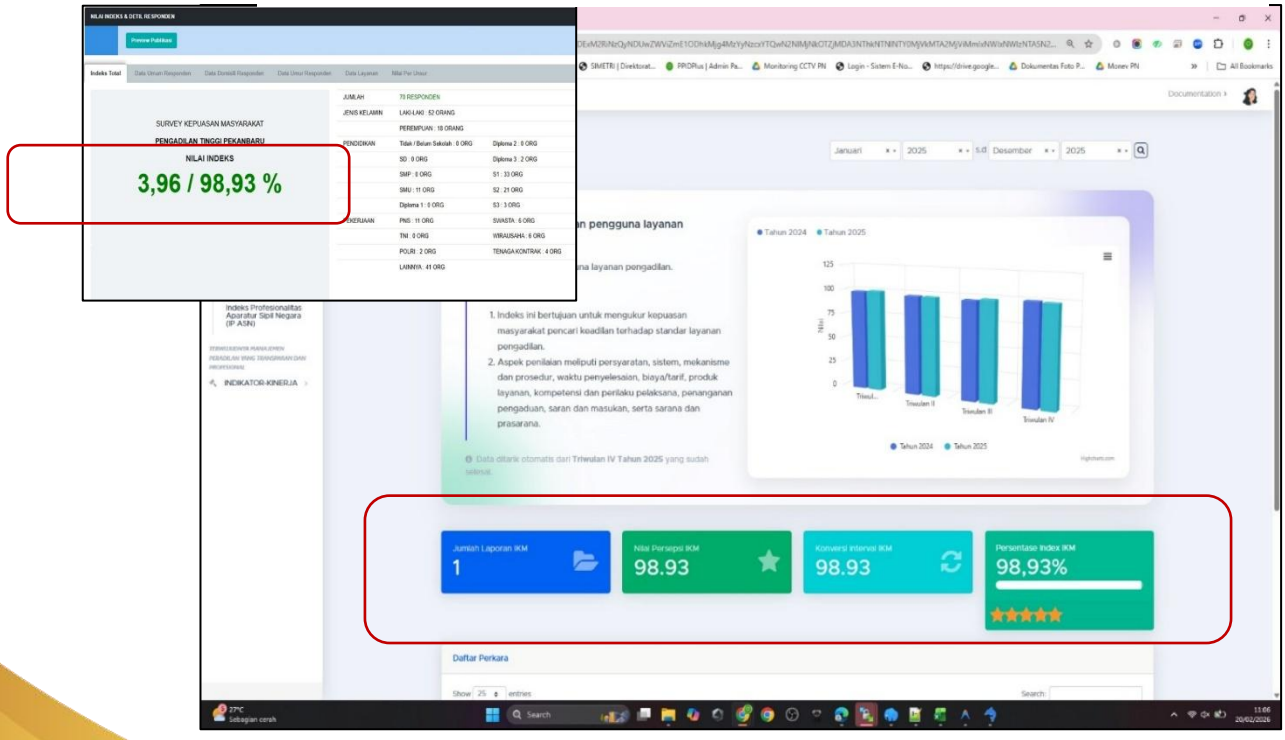

Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan selama 5 tahun sejak tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan tahun 2021-2025

TAHUN	NO	RUANG LINGKUP	SKOR	KATEGORI	REALISASI
Th. 2025	1	Persyaratan	3,97	Sangat baik	3,97
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,92	Sangat baik	3,92
	3	Waktu Penyelesaian	3,97	Sangat baik	3,97
	4	Biaya/Tarif	3,92	Sangat Baik	3,92
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,94	Sangat baik	3,94
	6	Kompetensi Pelaksana	3,98	Sangat baik	3,98
	7	Perilaku Pelaksana	3,97	Sangat baik	3,97
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	3,92	Sangat baik	3,92
	9	Sarana dan Prasarana	3,98	Sangat baik	3,98
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2025			**Sangat baik**	**3,96**
Th. 2024	1	Persyaratan	4,00	Sangat baik	4,00
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	4,00	Sangat baik	4,00
	3	Waktu Penyelesaian	4,00	Sangat baik	4,00
	4	Biaya/Tarif	4,00	Sangat Baik	4,00
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,00	Sangat baik	4,00
	6	Kompetensi Pelaksana	3,98	Sangat baik	3,98
	7	Perilaku Pelaksana	3,97	Sangat baik	3,97
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	4,00	Sangat baik	4,00
	9	Sarana dan Prasarana	4,00	Sangat baik	4,00
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2024			**Sangat baik**	**3,98**
Th. 2023	1	Persyaratan	3.97	Sangat baik	3.97
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.97	Sangat baik	3.97
	3	Waktu Penyelesaian	3,92	Sangat baik	3,92
	4	Biaya/Tarif	3,89	Sangat Baik	3,89
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,89	Sangat baik	3,89
	6	Kompetensi Pelaksana	3,89	Sangat baik	3,89
	7	Perilaku Pelaksana	3,92	Sangat baik	3,92
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	3,84	Sangat baik	3,84
	9	Sarana dan Prasarana	4,00	Sangat baik	4,00
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2023			**Sangat baik**	**3,97**
Th. 2022	1	Persyaratan	3,79	Sangat baik	3,79
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,84	Sangat baik	3,84
	3	Waktu Penyelesaian	3,74	Sangat baik	3,74
	4	Biaya/Tarif	3,86	Sangat Baik	3,86
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,84	Sangat baik	3,84
	6	Kompetensi Pelaksana	3,77	Sangat baik	3,77
	7	Perilaku Pelaksana	3,70	Sangat baik	3,70
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	3,81	Sangat baik	3,81
	9	Sarana dan Prasarana	3,95	Sangat baik	3,95
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2022			**Sangat baik**	**3,79**
Th. 2021	1	Persyaratan	3,95	Sangat baik	3,95
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	4,00	Sangat baik	4,00
	3	Waktu Penyelesaian	4,00	Sangat baik	4,00
	4	Biaya/Tarif	4,00	Sangat Baik	4,00
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,00	Sangat baik	4,00
	6	Kompetensi Pelaksana	4,00	Sangat baik	4,00
	7	Perilaku Pelaksana	4,00	Sangat baik	4,00
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	4,00	Sangat baik	4,00
	9	Sarana dan Prasarana	4,00	Sangat baik	4,00
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2021			**Sangat baik**	**3,95**

Grafik 2. Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan tahun 2021-2025

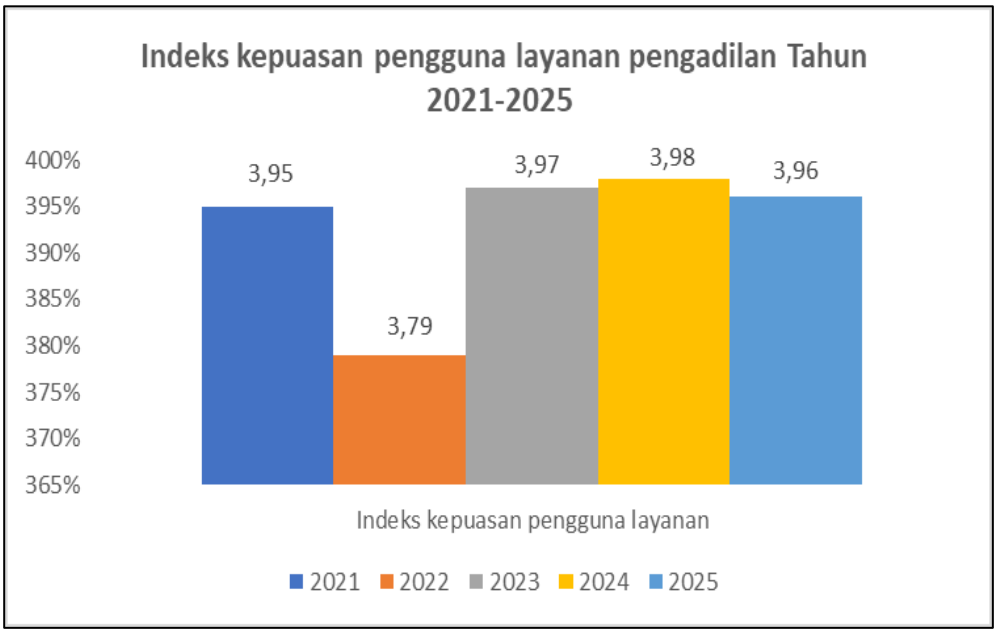

Berdasarkan Grafik 2 diatas, secara historis, realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang konsisten pada kategori sangat baik. Penilaian terhadap sembilan unsur pelayanan dari tahun ke tahun memperlihatkan stabilitas dan perbaikan berkelanjutan, yang mencerminkan upaya sistematis Pengadilan Tinggi Riau dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Tren ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya terjaga pada tahun berjalan, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka menengah.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 – Indikator 1, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Riau telah berjalan sangat baik, konsisten, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan peradilan semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga secara langsung mendukung terwujudnya Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publi kserta berkontribusi terhadap pencapaian, dan tercapainya Tujuan 1, yaitu Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Penerapan standar pelayanan yang konsisten dan terukur pada seluruh unit layanan.
2. Pemanfaatan sistem survei elektronik yang menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kemudahan pengukuran kepuasan pengguna.
3. Peningkatan kompetensi dan integritas aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
4. Penguatan pengawasan dan tindak lanjut atas pengaduan, saran, dan masukan pengguna layanan.
5. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang semakin memadai dan mendukung kenyamanan pencari keadilan.

TUJUAN 2 :

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

SASARAN STRATEGIS 3 :

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78	81,58	104,6%
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98	100	102%
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98	100	102,0%
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	85	106%
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	85	106%
6	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3	3,2	106,7%
	Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3			**104,6%**

Sasaran Strategis 3 - Indikator 1
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau

Indikator kinerja "Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)" adalah indeks yang bertujuan untuk mengukur profesionalistas ASN, ditinjau dari 4 unsur yaitu : Kompetensi (40%), Kinerja (30%), Kualifikasi (25%), dan Disiplin (5%). Dasar hukum pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diatur oleh peraturan BKN No. 8 Tahun 2019.

IP ASN diukur melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) Mahkamah Agung. Berdasarkan tabel penilaian terhadap 90 pegawai, diperoleh rata-rata IP ASN sebesar **81,58** yang menunjukkan bahwa kinerja ASN secara umum berada pada **kategori tinggi**. Dengan target 78 maka capaian kinerja indikator ini sebesar **104,6%.** Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat profesionalisme ASN di Pengadilan Tinggi Riau sudah berada pada level yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tampilan tabel perhitungan IP ASN pada aplikasi SIKEP dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 11. IP ASN pada SIKEP

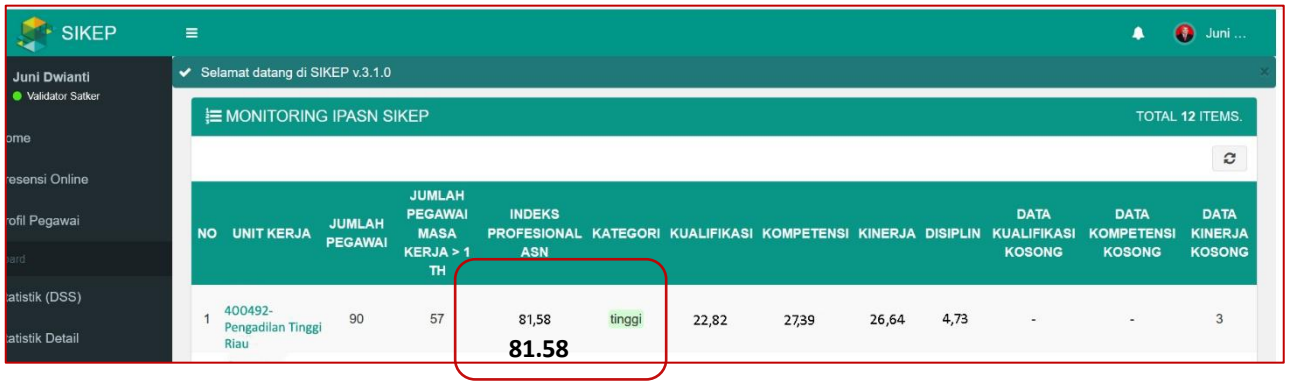

Gambar 12. Data IP ASN per Desember 2025

No	NIP Baru	Nama	Jabatan	IP ASN	Kategori	Golongan	Predikat Kinerja	JPL	Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
1	199405022025211048	Hadi Sutianto, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	100	sangat tinggi	IX	Sangat Baik	70	S-1	25	40	30	5
2	195908261987021001	Abdul Hutapea, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	100	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	24	S-2	25	40	30	5
3	196104021982032003	Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	100	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	54	S-3	25	40	30	5
4	198006162006042004	Juni Dwianti, S.Si, M.H.	Kabag Perencanaan & Kepegawaian	100	sangat tinggi	IV/b	Sangat Baik	33	S-2	25	40	30	5
5	199004112019032009	Intan Mahdalena, S.Sos	Operator - PLO	100	sangat tinggi	III/b	Sangat Baik	29	S-1	25	40	30	5
6	199207112019031006	Adetia Pratama, S.Kom.	Operator - PLO	100	sangat tinggi	III/a	Sangat Baik	54	S-1	25	40	30	5
7	199102062015031003	Fadhliamin, S.SI.	Pranata Komputer Ahli Muda	95	sangat tinggi	III/c	Sangat Baik	34	S-1	20	40	30	5
8	196110301986122001	Asmar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	95	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	0	S-2	25	35	30	5
9	196105301992121001	Dedy Hermawan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	95	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	0	S-2	25	35	30	5
10	196112051988031002	Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	95	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	0	S-2	25	35	30	5
11	196403251992121001	Dr. Dahlan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	95	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	0	S-3	25	35	30	5
12	196109121988031003	Jumongkas L. Gaol, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	95	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	0	S-2	25	35	30	5
13	196402211992122001	Lilin Herlina, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	95	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	0	S-2	25	35	30	5
14	196308171992121001	Sukri Sulumin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	95	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	4	S-2	25	35	30	5
15	196007171988032002	Yus Enidar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	95	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	0	S-2	25	35	30	5
16	197712242006042001	Dersima Harahap, S.E., M.H.	Kasubbag Keuangan & Pelaporan	95	sangat tinggi	IV/a	Sangat Baik	4	S-2	25	35	30	5
17	198412042009041005	Roby Hidayat, S.T., M.H.	Kabag Umum & Keuangan	95	sangat tinggi	IV/a	Sangat Baik	4	S-2	25	35	30	5
18	198508102009122010	Eka Chitra Murvirianti, S.E.	Pranata Keuangan APBN Mahir	95	sangat tinggi	III/c	Sangat Baik	10	S-1	25	35	30	5
19	198406132009121004	Manase Siahaan, S.H., M.H.	Kasubbag Rencana Program & Anggaran	95	sangat tinggi	III/c	Sangat Baik	8	S-2	25	35	30	5
20	199405212019032008	Anggi Haulani Adha, S.E., M.M.	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	95	sangat tinggi	III/b	Sangat Baik	17	S-2	25	35	30	5
21	198508182019031002	Rommy Saputra, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional	95	sangat tinggi	III/b	Sangat Baik	0	S-1	25	35	30	5
22	199010172022031004	Yudi Oktavianus, S.E	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	95	sangat tinggi	III/a	Sangat Baik	4	S-1	25	35	30	5
23	199004182019032010	Arini Puspasari, A.Md.	Klerek - Pengelola Layanan Pengadaan	95	sangat tinggi	II/d	Sangat Baik	0	D-III	25	35	30	5
24	3273140807750005	Dr Busrizalti, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	95	sangat tinggi	-	Sangat Baik	0	S-3	25	35	30	5
25	196205151992121002	Mian Munte, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	93	sangat tinggi	IV/e	Sangat Baik	4	S-2	25	35	30	3
26	196402241986031005	Denni Sembiring, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	93	sangat tinggi	IV/a	Sangat Baik	0	S-2	25	35	30	3
27	196603171988032002	Ida Ayu Ngurah Ratnayani, S.H., M.H.	Panitera Muda	93	sangat tinggi	IV/a	Sangat Baik	4	S-2	25	35	30	3
28	196206131988032001	Tirolan Nainggolan, S.H.	Hakim Tinggi	90	tinggi	IV/e	Sangat Baik	0	S-1	20	35	30	5
29	197902212005021001	T.Yudianto Syafei Narim, S.IP., S.H., M.M.	Sekretaris	90	tinggi	IV/c	Sangat Baik	4	S-1	20	35	30	5
30	196710171990031002	Supriady, S.H.	Panitera Tingkat Banding	90	tinggi	IV/b	Sangat Baik	0	S-1	20	35	30	5
31	196707051990031004	Efendi, S.H.	Panitera Muda	90	tinggi	IV/a	Sangat Baik	0	S-1	20	35	30	5
32	197108301994032001	Aminah, S.H.	Panitera Muda	90	tinggi	III/d	Sangat Baik	4	S-1	20	35	30	5
33	197407231994031003	Juslak Arthur Lanifanik Balukh, S.H.	Panitera Pengganti	90	tinggi	III/d	Sangat Baik	0	S-1	20	35	30	5
34	196711141994032004	Rehulina Br Brahmana, S.H.	Panitera Pengganti	90	tinggi	III/d	Sangat Baik	0	S-1	20	35	30	5
35	196412301985032002	Rosdiana Sitorus, S.H.	Panitera Pengganti	90	tinggi	III/d	Sangat Baik	0	S-1	20	35	30	5
36	197201011992032003	Sinta Herawati, S.H.	Panitera Pengganti	90	tinggi	III/d	Sangat Baik	4	S-1	20	35	30	5
37	198810232015032002	Betharia Oktaviani, S.E.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli	90	tinggi	III/c	Sangat Baik	10	S-1	20	35	30	5
38	197404132003121002	Permaizal	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran	90	tinggi	III/b	Sangat Baik	0	SLTA/SEDERAJAT	20	35	30	5
39	198512022015031002	Muhadi, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tek	90	tinggi	III/c	Sangat Baik	25	S-1	25	30	30	2
40	199506232024051001	Riskon As Shiddiqie, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	90	sedang	III/a	Baik	647	S-1	25	30	25	2
41	199103222025211039	FUAD ALATAS, S.Sos.	Operator - Penata Layanan Operasional	90	sedang	IX	Baik	50	S-1	20	35	25	2
42	198811022025211027	GUNTUR LUBIS, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	90	sedang	IX	Baik	50	S-1	20	35	25	2
43	196402261990031005	Abdul Azis, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan	85	sedang	IV/e	Baik	24	S-2	20	30	25	2
44	199105012023211024	Hendra Setiawan, S.Ap.	Arsiparis Ahli Pertama	85	sedang	IX	Baik	27	S-1	20	30	25	2
45	199701062020122006	Asyura Tri Rahmadhani, A.Md.A.B.	Arsiparis Terampil	85	sedang	II/d	Baik	32	D-III	20	30	25	2
46	196112251988031005	Mohammad Noor, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	85	sedang	IV/e	Baik	0	S-2	20	30	25	2
47	196803171996031002	Didik Trisulistya, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	85	sedang	IV/d	Baik	0	S-2	20	30	25	2
48	196501201993032001	Manidar, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	85	sedang	IV/a	Baik	0	S-2	20	30	25	2
49	196502261985032002	Netty Riama, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	85	sedang	IV/a	Baik	0	S-2	20	30	25	2
50	198609112012122001	Mella Rosaria Indah, S.H., M.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	85	sedang	III/d	Baik	0	S-2	20	30	25	2

51	198207162009042011	Roma Tua Juwyta Sihombing, S.E	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ruma	85	sedang	III/d	Sangat Baik	4	S-1	20	30	25	2
52	198802232009042001	Isra Filona, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	85	sedang	III/c	Sangat Baik	0	S-1	20	30	25	2
53	199303102020121005	Melgisaputra Dwi Nanda, S.Kom.,M.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	85	sedang	III/b	Sangat Baik	14	S-2	20	30	25	2
54	199311142019032018	Novalia Simamora, S.H	Klerek - Analis Perkara Peradilan	85	sedang	III/b	Sangat Baik	0	S-1	20	30	25	2
55	199202172015032002	Arshita Febrina Silalahi, A.Md.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	80	sedang	III/a	Sangat Baik	0	D-III	20	30	25	2
56	197902102006042003	Katarina Hutapea, S.Si	Operator - Penata Layanan Operasional	75	sedang	III/a	Sangat Baik	0	S-1	20	25	25	2
57	199802282022032011	Felin Stefani Lumbantobing, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	72	sedang	II/c	Sangat Baik	0	D-III	20	25	25	2
58	1471071006700023	Hendri, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	72	sedang	-	Sangat Baik	0	S-2	20	25	25	2
59	3175101808680001	Tantowi Jauhari, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	72	sedang	-	Sangat Baik	0	S-2	20	25	25	2
60	197803052025211032	ISMARDI	Operator Layanan Operasional	72	sedang	V	Baik	50	SLTA/SEDERAJAT	20	20	25	2
61	198305292025211036	MUDORI	Operator Layanan Operasional	72	sedang	V	Baik	50	SLTA/SEDERAJAT	20	20	25	2
62	197912022025211022	MUHAMAD SYAHRIR	Operator Layanan Operasional	72	sedang	V	Baik	50	SLTA/SEDERAJAT	20	20	25	2
63	198707122025211048	NUROKHIM, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	72	sedang	IX	Baik	5	S-1	25	20	25	2
64	197312052006041013	Fajrul Amni, A.Md.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	72	sedang	III/a	Sangat Baik	0	D-III	25	20	25	2
65	196508241989031003	Suyatno, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	72	sedang	IV/a	Sangat Baik	0	S-2	25	20	25	2
66	198011232023211008	Yudhi Darmawan, S.E.	Perencana Ahli Pertama	72	sedang	IX	Sangat Baik	23	S-1	20	20	25	2
67	197007071996031002	Endrabakti Heris Setiawan, S.H.	Hakim Tinggi	72	sedang	IV/d	Sangat Baik	0	S-1	20	20	25	2
68	196409121983021001	Rustam, S.H.	Panitera Muda	72	sedang	IV/a	Sangat Baik	0	S-1	20	20	25	2
69	198310082009042004	Indah Muharani, S.T.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli	72	sedang	III/d	Sangat Baik	10	S-1	20	20	25	2
70	197306222001122001	Marlina Flora Eva Juniar Simamora, S.H.	Panitera Pengganti	72	sedang	III/d	Sangat Baik	0	S-1	20	20	25	2
71	196407261985032002	Meliana, S.H.	Panitera Pengganti	72	sedang	III/d	Sangat Baik	0	S-1	20	20	25	2
72	198506142009041003	Andi Anugra, S.H.	Klerek - Penata Keprotokolan	72	sedang	III/c	Sangat Baik	0	SLTA/SEDERAJAT	20	20	25	2
73	196806141992032002	Jusniwati	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran	72	sedang	III/b	Sangat Baik	0	SLTA/SEDERAJAT	20	20	25	2
74	198007232025211026	ROTAL NGALAMIN	Operator Layanan Operasional	72	sedang	V	Baik	5	SLTA/SEDERAJAT	20	20	25	2
75	198312142025211025	SYAMBUDI	Operator Layanan Operasional	72	sedang	V	Baik	5	SLTA/SEDERAJAT	20	20	25	2
76	197307221993031001	Jafri Zen, S.H.	Panitera Pengganti	72	sedang	IV/a	Baik	0	S-1	20	20	25	2
77	197307281993031002	Kamaluddin	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran	72	sedang	III/b	Baik	0	SLTA/SEDERAJAT	20	20	25	2
78	199610312020122008	Ozza Profita, A.Md.	Arsiparis Terampil	72	sedang	II/d	Baik	10	D-III	20	20	25	2
79	199707182025061011	AHMAD JAINI, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Infor	72	sedang	III/a	Baik	0	S-1	25	20	25	2
80	199910132025062018	VIOLA DONITA, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	72	sedang	III/a	Baik	0	S-1	25	20	25	2
81	199609222025062011	ANGELA CHRISTINA HUTAPEA, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	72	sedang	II/c	Baik	0	D-III	25	20	25	2
82	199903272025062018	VERONIKA HUTAHAEAN, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	72	sedang	II/c	Baik	0	D-III	25	20	25	2
83	199101292022032006	Yesica Windayana Malau, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	72	sedang	II/c	Baik	0	D-III	25	20	25	2
84	196402031988031004	Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	72	sedang	IV/e	Baik	0	S-2	25	20	25	2
85	197905212008051001	Darwis, S.Kom.	Operator - Penata Layanan Operasional	72	sedang	III/c	Baik	0	S-1	25	20	25	2
86	196506131986032002	Zulhelmi, S.H.	Panitera Pengganti	70	rendah	III/d	Sangat Baik	0	SLTA/SEDERAJAT	25	20	25	2
87	196505151989032002	Linda Sriyanti	Panitera Pengganti	70	rendah	III/c	Sangat Baik	0	SLTA/SEDERAJAT	25	20	25	2
88	196603061986032002	Murni Rozalinda, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	-	tidak valid	IV/e		24	S-2	25	20	-	2
89	196410061991031002	Saiman, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	-	tidak valid	IV/e		0	S-2	25	20	-	2
90	198103272002122003	Dwiyana Falahni, S.ST.	Operator - Penata Layanan Operasional	-	tidak valid	III/d		0	D-IV	25	20	-	2
			Rata-rata IP ASN	**81,58**									

Pengukuran IP ASN pada SIKEP baru dilaksanakan sejak tahun 2025, sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Riau dalam meningkatkan profesionalisme aparatur telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah berjalan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas aparatur. Dengan demikian, capaian indikator ini secara langsung mendukung terwujudnya Sasaran Strategis 3, yaitu penguatan tata kelola dan manajemen internal yang profesional, serta berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 3, yaitu terwujudnya aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang berkualitas.

Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Pengadilan Tinggi Riau antara lain:

1. Penerapan sistem penilaian kinerja dan system kepegawaian yang objektif, terintegrasi, dan akuntabel.
2. Komitmen pimpinan dalam mendorong peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja aparatur secara berkelanjutan, melalui pengusulan dan keikutsertaan Hakim serta pegawai dalam pendidikan dan pelatihan.
3. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan, dan Focus Group Discussion (FGD) secara konsisten dan selaras dengan kebutuhan organisasi, baik yang diselenggarakan oleh Badilum, Perisai, maupun oleh Pengadilan Tinggi Riau melalui program Dialog Interaktif Prima (Pengadilan Tinggi Riau Menyapa).
4. Penguatan budaya kerja, disiplin, dan integritas aparatur yang secara berkelanjutan mendukung peningkatan kualitas kinerja secara menyeluruh.

Disamping berbagai faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengukuran dan peningkatan IP ASN, antara lain:

1. Pengukuran IP ASN yang masih relatif baru sehingga sebagian aparatur masih memerlukan penyesuaian dalam pemenuhan dan pemutakhiran data pada aplikasi SIKEP.
2. Keterbatasan waktu dan kesempatan bagi sebagian pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara merata, terutama bagi pegawai dengan beban kerja tinggi.
3. Masih perlunya peningkatan konsistensi dan ketertiban dalam penginputan data kepegawaian agar seluruh komponen penilaian dapat tergambar secara lebih akurat dan komprehensif.

Sasaran Strategis 3 - Indikator 2
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Indikator kinerja "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)" merupakan ukuran kualitas pelaksanaan anggaran DIPA (01) yang dinilai berdasarkan beberapa komponen, yaitu Revisi DIPA (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Penyelesaian Tagihan (10%), Dispensasi SPM (sebagai faktor pengurang nilai IKPA), Deviasi Halaman III DIPA (15%), Belanja Kontraktual (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), serta Capaian Output (25%).

Nilai IKPA DIPA (01) digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pada Badan Urusan Administrasi Pengadilan Tinggi Riau (kode satker 400492), yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan administrasi umum peradilan, meliputi belanja pegawai, belanja barang operasional perkantoran, belanja modal, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pengukuran nilai IKPA dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran) Kementerian Keuangan. Pada tahun 2025, seluruh komponen penilaian IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) memperoleh nilai 100, sehingga nilai IKPA tercatat maksimal sebesar **100**. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 98, capaian indikator ini melampaui target yang telah ditentukan, dengan capaian sebesar **102%**.. **R**incian perhitungan nilai IKPA dan tampilan realisasi pada aplikasi OM-SPAN disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Gambar 13. Nilai IKPA DIPA (01) pada Omspan

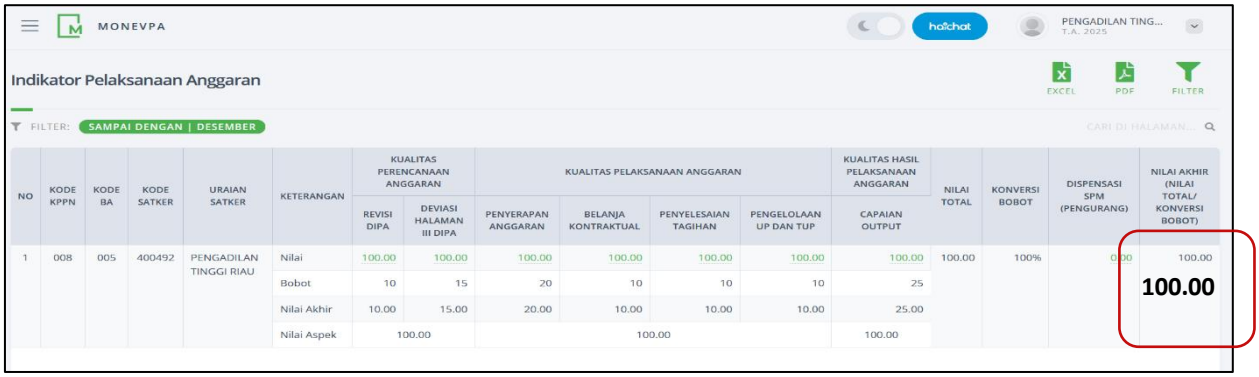

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/ KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	008	005	400492	PENGADILAN TINGGI RIAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Tabel 25. Rincian Nilai Ikpa DIPA (01) Tahun 2025

Kode Satker	Satker	Revisi DIPA	Deviasi Halaman 3 DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (mengurangi)	Nilai akhir
400492	Pengadilan Tinggi Riau	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	0,00	**100,00**

Selanjutnya, perkembangan realisasi nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) selama periode 2021–2025 disajikan dalam tabel dan grafik pendukung dibawah ini, yang menunjukkan tren kinerja pelaksanaan anggaran yang terjaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Tabel 26. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Tahun 2021-2025

Kode Satker	Satker	Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman 3 DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (mengurangi)	Nilai akhir
400492	**Pengadilan Tinggi Riau**	2025	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	0,00	**100,00**
		2024	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	0,00	**100,00**
		2023	100,00	89,34	100,00	100,00	100,00	97,06	100,00	98,64	100%	0,00	**98,64**
		2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	0,00	**100,00**
		2021	100,00	97,45	100,00	50,00	80,00	100,00	100,00	86,87	95,00%	0,00	**91,44**

Grafik 3.Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan tahun 2021-2025

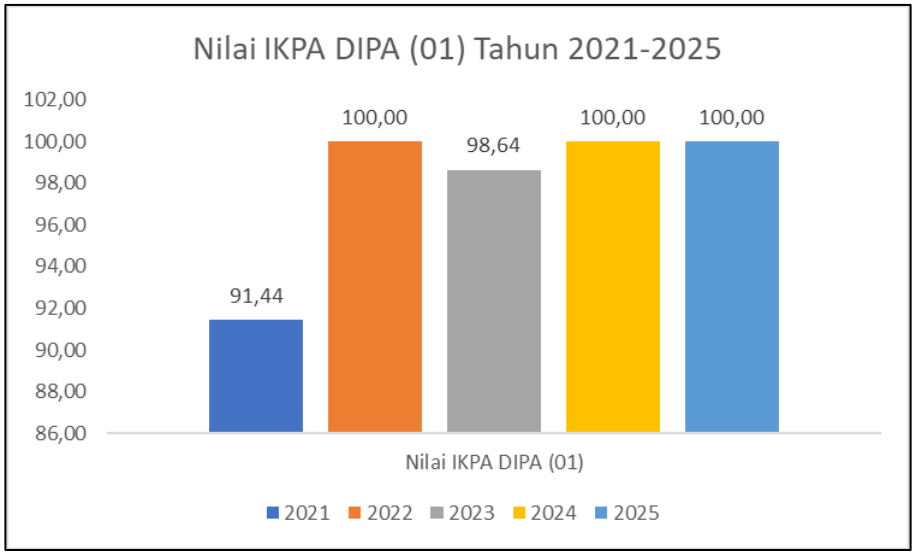

Berdasarkan hasil pengukuran, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Riau pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi berada pada kategori sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, dan tertib administrasi, sekaligus menunjukkan konsistensi peningkatan kualitas tata kelola keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan capaian indikator ini secara langsung mendukung terwujudnya Sasaran Strategis 3, yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya dan tata kelola organisasi, serta berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 2, yakni mewujudkan pengelolaan administrasi dan keuangan peradilan yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Kepatuhan dan konsistensi penerapan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara
2. Perencanaan dan pengendalian anggaran yang baik, sehingga deviasi pelaksanaan dapat diminimalkan.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi OM-SPAN dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.
4. Koordinasi yang efektif dalam proses penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP/TUP.
5. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Sasaran Strategis 3 - Indikator 3
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Indikator kinerja "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum)" merupakan ukuran kualitas pelaksanaan anggaran pada DIPA (03) yang dikelola oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Riau (kode satker 400493). Pengukuran IKPA dilakukan berdasarkan beberapa komponen penilaian, meliputi Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, Deviasi Halaman III DIPA, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, serta Capaian Output. Nilai IKPA DIPA (03) digunakan untuk menilai kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Tinggi Riau, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknis yudisial. Alokasi anggaran ini mencakup kegiatan penanganan perkara, pembinaan teknis peradilan, serta pelaksanaan program-program strategis yang secara langsung menunjang fungsi peradilan umum.

Pada tahun 2025, pengukuran nilai IKPA DIPA (03) dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN Kementrian Keuangan. Seluruh komponen penilaian memperoleh nilai maksimal, sehingga total nilai IKPA mencapai **100**. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 98, maka capaian indikator ini mencapai **102%.** Adapun rincian perhitungan nilai IKPA DIPA (03) dan tampilan realisasi IKPA pada aplikasi OM-SPAN disajikan pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 27. Rincian perhitungan nilai IKPA DIPA (03) Tahun 2025

Kode Satker	Satker	Revisi DIPA	Deviasi Halaman 3 DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (mengurangi)	Nilai akhir
400493	Pengadilan Tinggi Riau	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	0,00	**100,00**

Gambar 14. Nilai IKPA DIPA (03) pada Omspan

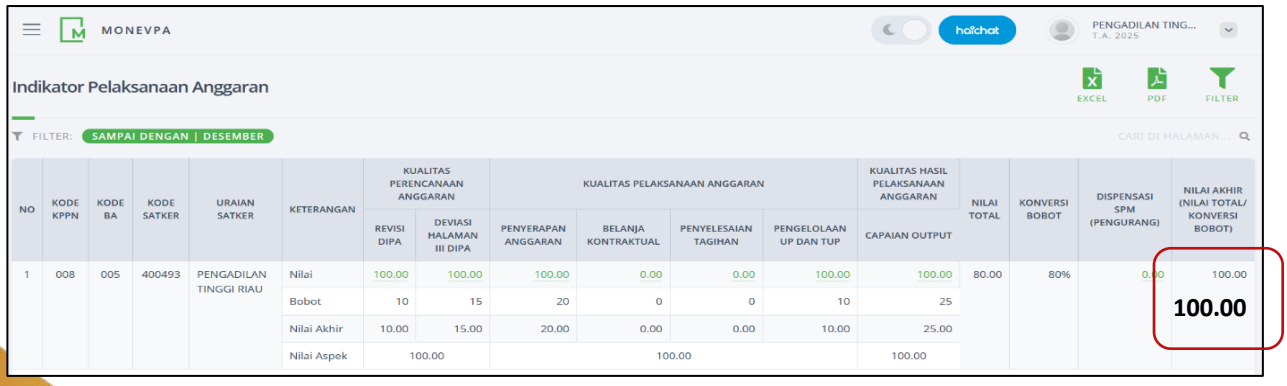

Selanjutnya, perkembangan realisasi nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) selama periode 2021–2025 disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini yang menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang terjaga secara konsisten dari tahun ke tahun.

Tabel 28. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Tahun 2021-2025

Kode Satker	Satker	Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman 3 DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (mengurangi)	Nilai akhir
400493	Pengadilan Tinggi Riau	2025	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	80,00	80%	0,00	**100,00**
		2024	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	80,00	80%	0,00	**100,00**
		2023	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	80,00	80%	0,00	**100,00**
		2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,34	100,00	99,93	100%	0,00	**99,93**
		2021	100,00	77,32	100,00	0,00	100,00	79,00	99,82	91,41	95,00%	85,00	**96,22**

Grafik 4. Realisasi IKPA DIPA (03) Tahun 2021-2025

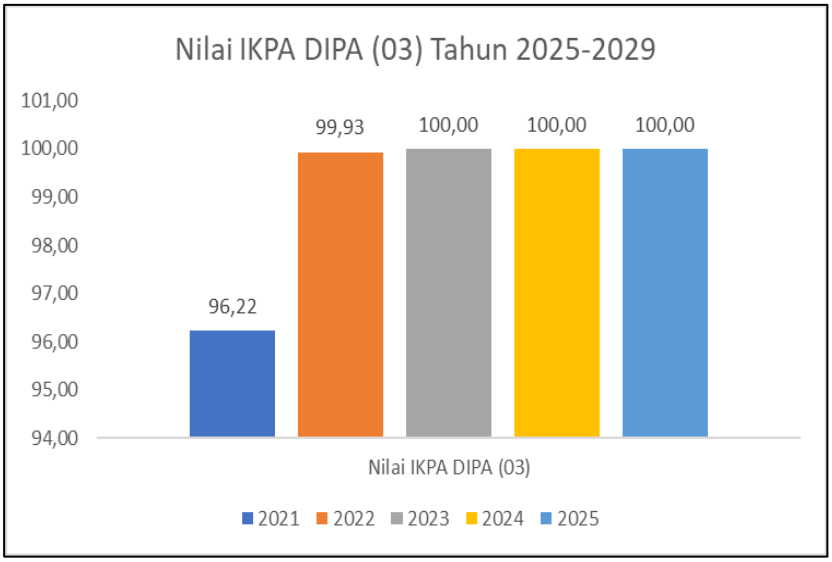

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Tinggi Riau telah dikelola secara sangat optimal, efektif, dan akuntabel. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Keberhasilan ini secara langsung mendukung tercapainya Sasaran Strategis 3, yaitu penguatan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan sumber daya, serta berkontribusi terhadap Tujuan 2, yaitu mewujudkan tata kelola peradilan yang modern, efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran yang konsisten melalui pemanfaatan aplikasi OM-SPAN dan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi.
2. Kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan negara, sehingga meminimalkan deviasi dan permasalahan administrasi.
3. Koordinasi yang efektif antara unsur pimpinan, pejabat perbendaharaan, dan unit kerja terkait, dalam memastikan kelancaran penyerapan anggaran dan penyelesaian tagihan.

Sasaran Strategis 3 - Indikator 4
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Indikator kinerja "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administras (BUA)" merupakan ukuran untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada DIPA (01), dengan kode satker 400492 yang dikelola oleh Badan Urusan Administrasi. Indikator ini menggambarkan perencanaan anggaran DIPA (01) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan administrasi umum peradilan, yang meliputi antara lain belanja pegawai, belanja barang operasional perkantoran, belanja modal, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 466 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 107 Tahun 2024. Nilai kinerja perencanaan anggaran berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Nilai Kinerja (NK) Perencanaan Anggaran diukur melalui aplikasi Monev Kemenkeu, yang disusun dari 2 dimensi utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas memiliki bobot 75% yang diukur melalui capaian Realisasi Output (RO), sementara Efisiensi memiliki bobot 25% yang diukur dengan membandingkan realisasi biaya pe routput terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK).

Pada tahun 2025, berdasarkan pengukuran Monev Kemenkeu, realisasi pengukuran NK Perencanaan DIPA (01) adalah **85**, dengan rician komponen pengukuran yaitu : Efektivitas (Capaian RO) : 800, Efisiensi (Penggunaan SBK) : 100, dan Efisiensi (Efisiensi SBK): 100. Target indikator ini adalah 80, jika dibandingkan realisasi, maka capaiannya sebesar **106,3%.** Rincian NK Perencanaan DIPA (01) dan tampilan pengukuran pada aplikasi Monev Kemenkeu , disajikan pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 29. NK Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2025

Kode Satker	Satker	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
			Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
400492	Pengadilan Tinggi Riau	**85,00**	80,00	100,00	100,00

Gambar 15. NK Perencanaan Anggaran DIPA (01) di Monev Kemenkeu

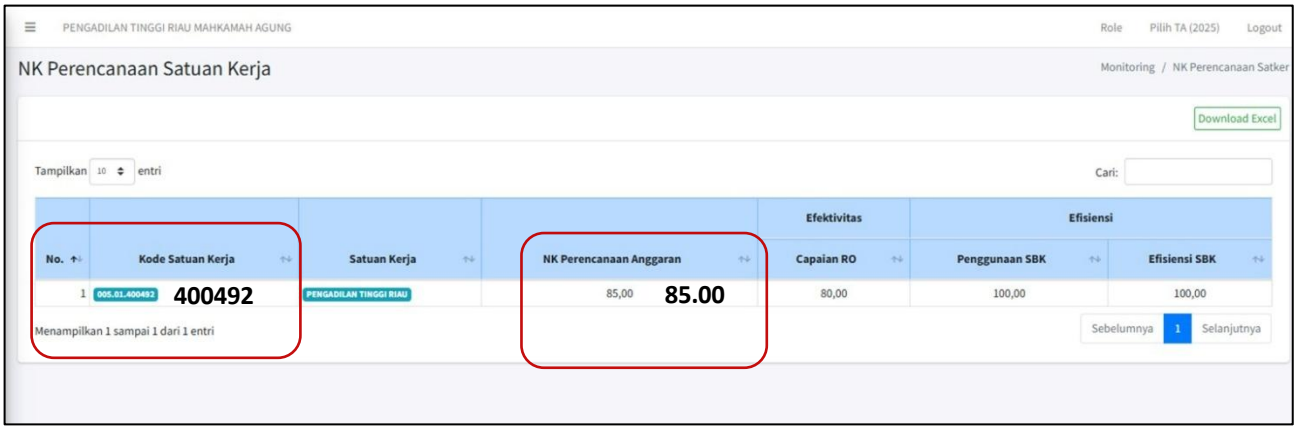

Pengukuran NK Perencanaan Anggaran melalui aplikasi Monev Kemenkeu mulai diterapkan sejak tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, kinerja perencanaan anggaran pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan, yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas perencanaan anggaran, baik dari sisi keselarasan antara perencanaan dan realisasi output maupun dari sisi efisiensi penggunaan anggaran. NK Perencanaan anggaran tahun 2024 dibandingkan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan grafik berikut.

Tabel 30. NK Perencanaan Anggaran DIPA (01) tahun 2024-2025

Kode Satker	Satker	Tahun	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
400492	Pengadilan Tinggi Riau	2025	**85,00**	80,00	100,00	100,00
		2024	**75,00**	100,00	0,00	0,00

Tabel 31. Realisasi NK Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2024-2025

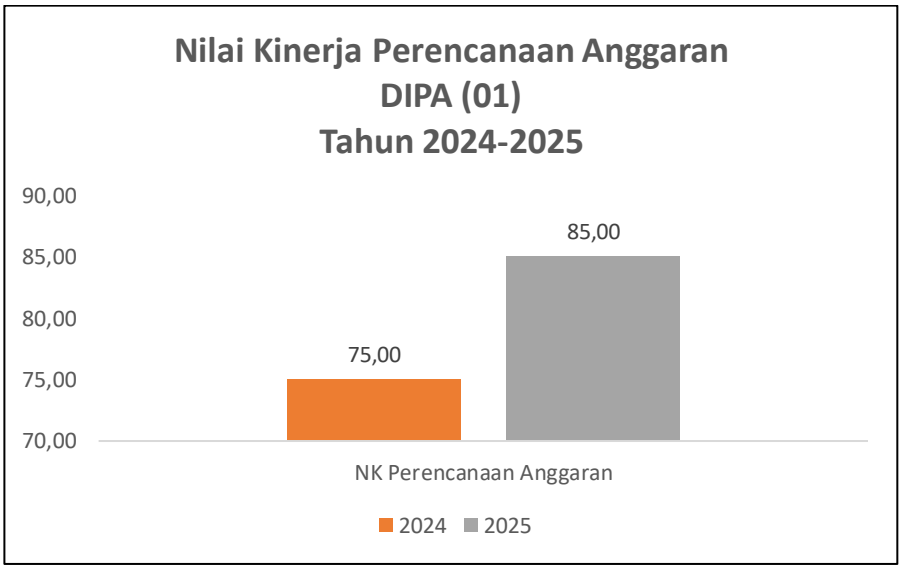

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja perencanaan anggaran DIPA (01) Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2025 berada pada kategori sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah disusun secara semakin efektif, efisien, dan selaras dengan target kinerja, serta mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal.Keberhasilan ini secara langsung berkontribusi terhadap terwujudnya Sasaran Strategis 3, yaitu peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta mendukung pencapaian Tujuan 2, yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya dan administrasi peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pencapaian kinerja perencanaan anggaran DIPA (01) Pengadilan Tinggi Riau didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Monev Kementerian Keuangan dalam monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran.
2. Koordinasi yang efektif antara unit perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan anggaran.
3. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam menjaga efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran.
4. Penerapan standar biaya dan pengendalian belanja secara konsisten.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi beberapa kendala, antara lain

1. Adanya dinamika kebijakan dan regulasi penganggaran yang memerlukan penyesuaian perencanaan di tengah tahun berjalan
2. Perbedaan tingkat pemahaman teknis aparatur terhadap mekanisme pengukuran kinerja anggaran berbasis Monev Kementerian Keuangan.

Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk terus memperkuat kualitas perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

Sasaran Strategis 3 - Indikator 5

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Indikator kinerja "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum" merupakan ukuran untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada DIPA (03), dengan kode satker 400493 yang dikelola oleh Badan Peradilan Umum. Indikator ini menggambarkan sejauh mana perencanaan anggaran disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknis yudisial. Anggaran ini mencakup kegiatan penanganan perkara, pembinaan teknis peradilan, serta program-program strategis yang berkaitan langsung dengan fungsi peradilan umum.

Nilai Kinerja (NK) Perencanaan Anggaran DIPA (03) juga diukur melalui aplikasi Monev Kemenkeu, dari 2 komponen, yaitu efektivitas dan efisiensi. Pada tahun 2025, realisasi pengukuran NK)Perencanaan Anggaran DIPA (03) sebesar **85**, dengan rician komponen pengukuran yaitu : Efektivitas (Capaian RO) : 100, Efisiensi (Penggunaan SBK) : 100, dan Efisiensi (Efisiensi SBK): 100. Target indikator ini adalah 80, jika dibandingkan realisasi, maka capaiannya sebesar **106,3%**. Perhitungan NK Perencanaan Anggaran DIPA (03) dan tampilan pengukuran pada aplikasi Monev Kemenkeu , dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 32. NK Perencanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025

Kode Satker	Satker	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
			Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
400493	**Pengadilan Tinggi Riau**	**85,00**	100,00	100,00	0,00

Gambar 16. NK Perencanaan Anggaran DIPA (03) di Monev Kemenkeu

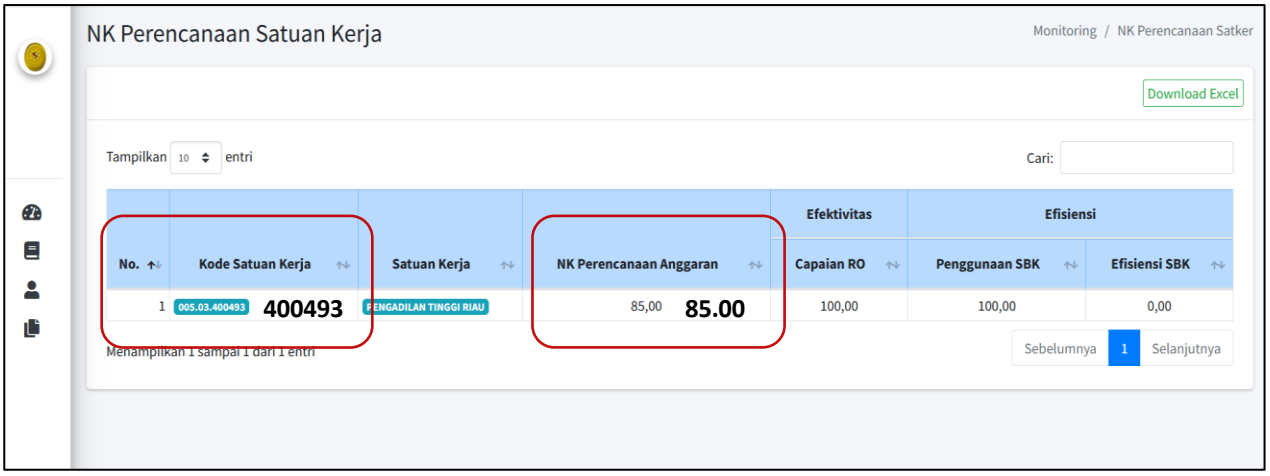

Pengukuran NK Perencanaan Anggaran (DIPA 03) juga baru diterapkan sejak tahun 2024. NK Perencanaan Anggaran Tahun 2024 sama persis dengan tahun 2025, yaitu sebesar 85, dengan rincian Efektivitas dan Efisiensi sama dengan tahun 2025. sama dengan tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran Pengadilan Tinggi Riau pada DIPA (03) telah berada pada tingkat yang stabil dan konsisten, serta mencerminkan terjaganya kesinambungan kinerja perencanaan anggaran yang efektif dan efisien

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh konsistensi penerapan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi teknis yudisial, serta komitmen pimpinan dan jajaran dalam menjaga kualitas perencanaan anggaran yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3 - Indikator 6
Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau

Indikator "Indeks Pengelolaan Aset" adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Parameter utama dalam pengukuran IPA meliputi: (1) Pengelolaan Aset yang Akuntabel dan Produktif; (2) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; (3) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif; (4) Administrasi Aset yang Andal. Dasar hukum pengukuran Indeks Pengelolaan Aset adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Pengukuran kinerja ini menggunakan aplikasi e-Sadewa Mahkamah Agung (aplikasi pengelolaan aset BMN).

Pada tahun 2025 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau sebesar **3,2**. Target indikator ini adalah 3, jika dibandingkan realisasi, maka capaiannya sebesar **106,7%.** Tampilan pengukuran IPA pada aplikasi e-Sadewa dan rincian perhitungan IPA disajikan pada gambar dan tabel di bawah ini.

Grafik 5. Pengukuran IPA pada aplikasi e-Sadewa

Tabel 33. Rincian perhitungan IPA

No	Parameter		Data		Nilai Parameter	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter/Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks
1	2		3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8
1.	**Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif**								
	1.1	**Penatausahaan BMN**					**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	**0,8**
							20%		
	1.1.1	Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN	**Jumlah Transaksi yang Telah di Verifikasi**	**jumlah transaksi**			**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	2,4
			23	24	100%	-	60%	4	
	1.1.2	Penjelasan Telaah Data BMN	**Data yang sudah dilakukan telaah atau penjelasan**	**jumlah data telaah**			**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	1,6
			1	1	100%	-	40%	4	
	1.2	**Realisasi PNBP dari pengelolaan aset**					**Bobot**		**0,375**
							15%		
	1.2.1	Realisasi pendapatan dari Pemanfataan BMN	**Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN**	**Total Estimasi Pendapatan dari Pemanfataan BMN**			**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	0,5
			205.000	-	0,0%		50%	1	
	1.2.2	Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	**Total Nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang**	**Total Nilai Pendapatan dari Seluruh Pemanfaatan BMN**			**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	2
			250.000	250.000	100%		50%	4	

2.	**Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan**								
	2.1	**Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN**					**Bobot**		**0,825**
							25%		
	2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	**Tanggal Terima**	**Batas Penyampaian**		**Lengkap/ Tidak lengkap**	**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	1,2
			4 Agustus 2025	8 Agustus 2025	≤ H-3	4	30%	4	
	2.1.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBKP	**Tanggal Terima**	**Batas Penyampaian**		**Lengkap/ Tidak lengkap**	**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	0,9
			[redacted]				30%	3	
	2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian WASDAL	**Tanggal Terima**	**Batas Penyampaian**		**Lengkap/ Tidak lengkap**	**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	1,2
			16 Januari 2025	16 Januari 2025	3	3	40%	3	
			7 Juli 2025	7 Juli 2025	3	3			
	3.1	**Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN**	**Jumlah persetujuan pengelolaan BMN yang ditindak lanjut**	**Jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang**			**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	**0,3**
			3	4	75%		10%	3	
	3.2	**Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya**	**Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir**	**Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal**	(57)		**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	**0,1**
			455.622.000	-	akhir t-0 > awal t-0	-	10%	1	
4.	**Administrasi BMN yang Andal**								
		BMN bersertipikat sesuai ketentuan	**Luas Tanah Bersertipikat (m2)**	**Total Luas Tanah (m2)**			**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	**0,4**
			11.795	11.795	100%		10%	4	
	4.1	**Penggunaan BMN sesuai ketentuan**	**Total Nilai Perolehan BMN yang Sudah PSP**	**Total Nilai Perolehan BMN**			**Bobot**	**indeks sebelum bobot**	**0,4**
			75.456.521.736	75.456.521.736	100%		10%	4	
								Nilai IPA	**3,200**

Pengukuran IPA, baru dilaksanakan di Mahkamah Agung sejak tahun 2025, sehingga realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem dan praktik pengelolaan aset di Pengadilan Tinggi Riau telah sesuai standar tata kelola yang diharapkan. Dengan demikian, capaian Indikator 6 ini secara langsung mendukung terwujudnya Sasaran Strategis 3 serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan 2, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset negara.

Keberhasilan pencapaian target indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain :

1. Pemanfaatan aplikasi e-Sadewa sebagai sistem pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang terintegrasi
2. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan aset
3. Penatausahaan dan pengawasan aset yang semakin tertib dan akuntabel.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi sejumlah kendala, diantaranya :

1. Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang baru pertama kali diterapkan sehingga masih memerlukan penyesuaian teknis
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan aplikasi dan pemenuhan indikator penilaian IPA, Perlunya penyempurnaan pemutakhiran data aset agar lebih akurat dan andal.

3. REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA

Sehubungan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 yang telah diperbarui, maka tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan IKU tersebut. Oleh karena itu, untuk sebagian indikator kinerja belum tersedia target kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan periode sebelumnya.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang telah diukur secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Terhadap indikator-indikator tersebut, masih dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja untuk melihat tren kinerja selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja Pengadilan Tinggi Riau dari waktu ke waktu, baik dari aspek konsistensi capaian maupun peningkatan kualitas kinerja.

Tabel 34. Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Realisasi				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan								
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
		1.4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	13%	29%	33%	83%	100%
		1.5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	N/A	N/A	N/A	N/A	52%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,95	3,79	3,97	3,98	3,96
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional								
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	N/A	N/A	N/A	N/A	81,58
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	91,44	100	98,64	100	100
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	96,22	100	100	100	100
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	N/A	N/A	N/A	75	85
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	N/A	N/A	N/A	85	85
		3.6	Indeks Pemgelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	N/A	N/A	N/A	N/A	3,20

Secara umum, meskipun tahun 2025 merupakan tahun awal penerapan IKU Renstra yang baru sehingga tidak seluruh indikator dapat dianalisis secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya, data historis pada beberapa indikator menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Riau berada pada kondisi yang stabil dan cenderung menunjukkan penguatan kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa proses transisi menuju penerapan IKU yang baru tetap dapat menjaga kesinambungan kinerja organisasi, sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

4. REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN TARGET JANGKA MENENGAH

Target jangka menengah merupakan rata-rata target kinerja selama 5 (lima) tahun sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029. Secara umum, target indikator kinerja tahun 2025 sama dengan target jangka menengah. Namun, terdapat dua indikator yang berbeda, yaitu persentase perkara pidana yang menggunakan e-Berpadu dan IP ASN. Perbedaan ini terjadi karena tahun 2025 sebagai tahun pertama periode Renstra memiliki target yang berbeda dengan empat tahun berikutnya, sehingga rata-rata target jangka menengah menjadi berbeda dibandingkan target tahun 2025.

Tabel 35. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan capaian kinerja target jangka menengah

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Kinerja Target Jangka Menengah		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 :	**Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan**								
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	100%	103,1%	97%	100%	103,1%
		1.2	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	100%	103,1%	97%	100%	103,1%
		1.4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	99%	100%	101%	99%	100%	101%
		1.5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	50%	52%	104%	82%	52%	63%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			**102,2%**			**94,1%**
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,96	102,9%	3,85	3,96	102,9%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			**102,9%**			**102,9%**
Tujuan 2 :	**Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**								
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78	81,58	104,6%	83,6	81,58	97,6%
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98	100	102%	98	100	102%
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98	100	102%	98	100	102%
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	85	106,3%	80	85	106,3%
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	85	106,3%	80	85	106,3%
		3.6	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3	3	106,7%	3	3	106,7%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3			**104,6%**			**103,5%**
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1, 2 dan 3						**103,2%**			**100,2%**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 34 menunjukkan bahwa kinerja secara umum berada pada kategori sangat baik, dan perbedaan capaian terutama dipengaruhi oleh perbedaan penetapan target pada dua indikator tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada Sasaran Strategis 1, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 102,2% lebih tinggi dibandingkan capaian terhadap target jangka menengah 94,1%, hal ini disebabkan karena target indikator e-Berpadu tahun 2025 ditetapkan lebih rendah dibandingkan target jangka menengah, sementara indikator lainnya sama.
2. Pada Sasaran Strategis 2, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 102,9% sama dengan capaian terhadap target jangka menengah karena menggunakan target indikator yang sama.
3. Pada Sasaran Strategis 3, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 104,6% lebih tinggi dibandingkan capaian terhadap target jangka menengah 103,5%, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan target pada indikator IP ASN, dimana target tahun 2025 ditetapkan lebih rendah dibandingkan rata-rata target jangka menengah.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja tahun 2025 mencapai 103,2%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian terhadap target jangka menengah sebesar 100,2%. Hal ini menegaskan bahwa perbedaan capaian terutama disebabkan oleh perbedaan basis target indikator pada masa transisi awal Renstra, bukan oleh penurunan kualitas kinerja. Dengan demikian, kinerja tahun 2025 menunjukkan konsistensi dan kesiapan dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029 secara berkelanjutan.

5. REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN STANDAR NASIONAL

Berdasarkan data pada Tabel 35, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 dianalisis dengan dua pendekatan perbandingan, yaitu: (1) Dibandingkan dengan capaian kinerja menggunakan target sesuai standar nasional, dan (2) Dibandingkan antara capaian kinerja menggunakan target standar nasional dengan capaian kinerja rata-rata 34 Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Target standar nasional adalah target yang ditetapkan pada Benchmark Kinerja sebagai parameter pembanding kinerja Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum. Benchmark kinerja di lingkungan peradilan umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum No. 1665/DJU/SK.OT1.6/XI/2025. Tanggal 12 November 2025, sedangkan capaian kinerja rata-rata 34 Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum, disampaikan pada Surat Badilum No. 425/DJU/OT1.6/II/2026 tanggal 20 Februari 2026. Analisis perbandingan capaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertama, jika dibandingkan antara capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 dengan capaian kinerja berdasarkan standar nasional, secara umum terlihat bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Riau berada pada tingkat yang kompetitif dan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini perlu dilihat dalam konteks bahwa target kinerja Tahun 2025 pada tiga sasaran strategis pada prinsipnya ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan target standar nasional, kecuali pada indikator persentase perkara pidana yang menggunakan e-Berpadu pada Sasaran Strategis 1. Dengan demikian, pencapaian kinerja yang diperoleh tidak hanya mencerminkan keberhasilan memenuhi target internal yang lebih menantang, tetapi juga menunjukkan komitmen Pengadilan Tinggi Riau untuk melampaui standar minimum nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kinerja Tahun 2025 disusun secara progresif dan berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja, bukan sekadar memenuhi ambang batas Benchmark Kinerja.

2. Kedua, apabila digunakan realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 dengan menggunakan target standar nasional, kemudian dibandingkan dengan capaian kinerja rata-rata Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum, terlihat bahwa capaian kinerja rata-rata Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum masih lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun kinerja Pengadilan Tinggi Riau telah berada pada kategori baik dan memenuhi bahkan melampaui sebagian standar yang ditetapkan, secara komparatif masih terdapat ruang peningkatan agar dapat menyamai atau melampaui kinerja rata-rata nasional di lingkungan peradilan umum. Dengan kata lain, capaian yang telah diraih merupakan modal yang positif, namun tetap diperlukan penguatan kinerja yang lebih konsisten dan terfokus pada indikator-indikator yang masih berada di bawah rata-rata nasional.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 yang relatif lebih tinggi dibandingkan standar nasional dan mampu mencapai kinerja yang baik terhadap target tersebut, sehingga mencerminkan arah kebijakan peningkatan kinerja yang progresif. Namun, jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum, kinerja Pengadilan Tinggi Riau masih perlu terus ditingkatkan agar tidak hanya unggul dalam perencanaan target, tetapi juga mampu bersaing dan melampaui capaian kinerja rata-rata nasional secara berkelanjutan.

Tabel 36. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan capaian kinerja target standar nasional dan rata-rata 34 Pengadilan Tinggi

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Kinerja Target Standar Nasional			Kinerja Rata-rata 34 Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 :	**Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan**											
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	100%	103%	96,46%	100%	104%	96,46%	100%	104%
		1.2	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	100%	103%	90,11%	100%	111%	90,11%	100%	111%
		1.4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	99%	100%	101%	95,76%	100%	104%	95,76%	99%	103%
		1.5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	50%	52%	104%	89,93%	52%	58%	89,93%	73%	81%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				**102,2%**			**95,4%**			**99,8%**
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,96	102,9%	3,78	3,96	104,8%	3,78	3,90	103%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				**102,9%**			**104,8%**			**103,2%**
Tujuan 2 :	**Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**											
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78	81,58	104,6%	71	81,58	114,9%	71	81,62	115%
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98	100	102%	93	100	108%	93	97,7	105%
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98	100	102%	93	100	108%	93	93,4	100%
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	85	106,3%	75	85	113,3%	75	97,4	130%
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	85	106,3%	75	85	113,3%	75	87,0	116%
		3.6	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3	3	106,7%	3	3	106,7%	3	3,4	112%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				**104,6%**			**110,5%**			**113,1%**
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1, 2 dan 3						**103,2%**			**103,6%**			**105,4%**

Gambar 18. Capaian Kinerja Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum

No.	Satuan Kerja	Sasaran Strategis I : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern															Sasaran Strategis II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional																	
		Indikator Kinerja															Indikator Kinerja			Indikator Kinerja																		
		Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu			Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan eCourt			Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan eBerpadu			Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03			Nilai Kinerja Perancanaan Anggaran DIPA 01			Nilai Kinerja Perancanaan Anggaran DIPA 03			Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja		
		Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian	Target Nasional	Realisasi	Capaian
1	PT Jakarta	96,46%	99,59%	103,24%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	96,48%	100,75%	89,93%	94,38%	104,95%	3,78	3,61	96%	71	87,48	123,21%	93	98,45	105,86%	93	90,75	97,58%	75	100	133,33%	75	87,45	116,60%	3,00	3,45	115,00%
2	PT Bandung	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	98%	102,43%	89,93%	41,28%	45,90%	3,78	3,97	105%	71	82,45	116,13%	93	93,2	100,22%	93	86,42	92,92%	75	93,3	124,40%	75	95,62	127,49%	3,00	3,18	106,00%
3	PT Jawa Tengah	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,28%	89,93%	79,39%	88,28%	3,78	3,94	104%	71	77,24	108,79%	93	99,71	107,22%	93	95,34	102,52%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	3,3	110,00%
4	PT Yogyakarta	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	72,07%	80,14%	3,78	3,928	104%	71	78,5	110,56%	93	97,41	104,74%	93	91,37	98,25%	75	100	133,33%	75	89,85	119,80%	3,00	3,3	110,00%
5	PT Surabaya	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	103,92%	89,93%	76,86%	85,47%	3,78	3,93	104%	71	75,87	106,86%	93	99,28	106,75%	93	93,18	100,19%	75	90,71	120,95%	75	87,99	117,32%	3,00	3,1	103,33%
6	PT Banda Aceh	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	98,95%	109,81%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	79,63%	88,55%	3,78	3,9	103%	71	79,42	111,86%	93	99,48	106,97%	93	99,3	106,77%	75	100	133,33%	75	85,77	114,36%	3,00	3,25	108,33%
7	PT Medan	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	99%	103,38%	89,93%	88,73%	98,67%	3,78	3,86	102%	71	81,85	115,28%	93	98	105,38%	93	98	105,38%	75	98	130,67%	75	83	110,67%	3,00	3,65	121,67%
8	PT Padang	96,46%	98,00%	101,60%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	98%	102,34%	89,93%	71%	78,95%	3,78	3,83	101%	71	81,33	114,55%	93	94,7	101,83%	93	86,86	93,40%	75	81,25	108,33%	75	85	113,33%	3,00	3,37	112,33%
9	PT Riau	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	51,93%	57,74%	3,78	3,96	105%	71	81,58	114,90%	93	100	107,53%	93	100	107,53%	75	85	113,33%	75	85	113,33%	3,00	3,2	106,67%
10	PT Jambi	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	100,00%	111,20%	3,78	4	106%	71	79	111,27%	93	100	107,53%	93	100	107,53%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	3,75	125,00%
11	PT Palembang	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	76,47%	85,03%	3,78	3,99	106%	71	84,87	119,54%	93	95,14	102,30%	93	98,25	105,65%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	3,175	105,83%
12	PT Tanjung Karang	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	98%	102,34%	89,93%	80,65%	89,68%	3,78	4	106%	71	80,63	113,56%	93	97,72	105,08%	93	85,8	92,26%	75	100	133,33%	75	100	133,33%	3,00	3,1	103,33%
13	PT Pontianak	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	77%	85,29%	3,78	3,89	103%	71	87,26	122,90%	93	99	106,45%	93	89,4	96,13%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	3,625	120,83%
14	PT Palangkaraya	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	77,73%	86,43%	3,78	3,96	105%	71	83,98	118,28%	93	99,08	106,54%	93	96,41	103,67%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	3,35	111,67%
15	PT Banjarmasin	96,46%	99,81%	103,47%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	99,31%	103,71%	89,93%	87,14%	96,90%	3,78	3,98	105,29%	71	81,63	114,97%	93	98,77	106,20%	93	94,99	102,14%	75	100	133,33%	75	82	109,33%	3,00	3,25	108,33%
16	PT Kalimantan Timur	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	54,11%	60,17%	3,78	3,94	104%	71	84,24	118,65%	93	98,84	106,28%	93	90,46	97,27%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	3,6	120,00%
17	PT Manado	96,46%	100%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	99,52%	103,93%	89,93%	78,36%	87,13%	3,78	3,87	102%	71	77,33	108,92%	93	100	107,53%	93	100	107,53%	75	100	133,33%	75	91,49	121,99%	3,00	3,68	122,67%
18	PT Sulawesi Tengah	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	98,43%	102,79%	89,93%	79,10%	87,96%	3,78	3,90	103%	71	86,93	122,44%	93	98,63	106,05%	93	94,01	101,09%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	3,325	110,83%
19	PT Makassar	96,46%	99,91%	103,58%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	99,78%	104,20%	89,93%	75,82%	84,31%	3,78	3,64	96%	71	78,69	110,83%	93	100	107,53%	93	85,83	92,29%	75	83,73	111,64%	75	73,2	97,60%	3,00	2,95	98,33%
20	PT Kendari	96,46%	99,00%	102,63%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	99%	103,38%	89,93%	79,00%	87,85%	3,78	3,9	103%	71	79,53	112,01%	93	97,66	105,01%	93	84,37	90,72%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	4	133,33%
21	PT Ambon	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	99%	103,05%	89,93%	66,00%	73,39%	3,78	3,97	105%	71	82,2	115,77%	93	93	100,00%	93	93	100,00%	75	96,26	128,35%	75	96,26	128,35%	3,00	3,2	106,67%
22	PT Denpasar	96,46%	99,55%	103,20%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	83,44%	92,78%	3,78	3,91	103%	71	82,17	115,73%	93	99,97	107,49%	93	99,15	106,61%	75	100	133,33%	75	83,5	111,33%	3,00	3,525	117,50%
23	PT Mataram	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	99,59%	104,00%	89,93%	74,33%	82,65%	3,78	3,87	102%	71	85,05	119,79%	93	98,89	106,33%	93	93,33	100,35%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	3,33	111,00%
24	PT Kupang	96,46%	99,76%	103,42%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	98%	102,16%	89,93%	52,32%	58,18%	3,78	3,97	105%	71	79,92	112,56%	93	100	107,53%	93	100	107,53%	75	100	133,33%	75	86,62	115,49%	3,00	3,125	104,17%
25	PT Jayapura	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	57,25%	63,66%	3,78	3,85	102%	71	76,44	107,66%	93	97,99	105,37%	93	87,97	94,59%	75	100	133,33%	75	77,7	103,60%	3,00	3,2	106,67%
26	PT Bengkulu	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	98%	102,34%	89,93%	77,47%	86,14%	3,78	3,99	106%	71	77,1	108,59%	93	98,18	105,57%	93	94,24	101,33%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	3,4	113,33%
27	PT Maluku Utara	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	100%	111,20%	3,78	3,8	101%	71	84,72	119,32%	93	98,86	106,30%	93	91,17	98,03%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	3,2	106,67%
28	PT Banten	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	98,39%	102,75%	89,93%	19,67%	21,87%	3,78	3,88	103%	71	82,3	115,92%	93	98,64	106,06%	93	99,68	107,18%	75	100	133,33%	75	93,81	125,08%	3,00	3,5	116,67%
29	PT Bangka Belitung	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	63,48%	70,59%	3,78	3,95	104%	71	84,61	119,17%	93	99,97	107,49%	93	98,3	105,70%	75	100	133,33%	75	94,24	125,65%	3,00	3,6	120,00%
30	PT Gorontalo	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	100%	111,20%	3,78	3,96	105%	71	74,14	104,42%	93	97,57	104,91%	93	93,19	100,20%	75	92,14	122,85%	75	84,69	112,92%	3,00	3,64	121,33%
31	PT Kepulauan Riau	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	42,82%	47,61%	3,78	3,97	105%	71	83,88	118,14%	93	100	107,53%	93	89,94	96,71%	75	100	133,33%	75	88,68	118,24%	3,00	3,25	108,33%
32	PT Papua Barat	96,46%	96,84%	100,39%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	67,12%	74,64%	3,78	3,72	98%	71	80	112,68%	93	89,42	96,15%	93	89,86	96,62%	75	100	133,33%	75	85	113,33%	3,00	3,1	103,33%
33	PT Sulawesi Barat	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	100%	104,43%	89,93%	72,61%	80,74%	3,78	3,99	106%	71	84,03	118,35%	93	90,2	96,99%	93	91,77	98,68%	75	100	133,33%	75	92,1	122,80%	3,00	3,475	115,83%
34	PT Kalimantan Utara	96,46%	100,00%	103,67%	100%	100%	100%	90,11%	100%	110,98%	95,76%	86,36%	90,18%	89,93%	71,58%	79,60%	3,78	3,92	104%	71	88,62	124,82%	93	94,36	101,46%	93	94,36	101,46%	75	92,5	123,33%	75	92,5	123,33%	3,00	3,35	111,67%
RATA-RATA NASIONAL		**96,46%**	**99,78%**	**103,44%**	**100,00%**	**100%**	**100%**	**90,11%**	**99,97%**	**110,94%**	**95,76%**	**98,94%**	**103,32%**	**89,93%**	**72,60%**	**80,73%**	**3,78**	**3,90**	**103,29%**	**71,00**	**81,62**	**114,95%**	**93,00**	**97,71**	**105,06%**	**93,00**	**93,43**	**100,46%**	**75,00**	**97,44**	**129,92%**	**75,00**	**86,96**	**115,94%**	**3,00**	**3,37**	**112,25%**

6. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KENDALA

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator kinerja utama berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja organisasi telah berjalan secara efektif, terarah, dan berkesinambungan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, capaian kinerja Tahun 2025 tersebut juga telah disampaikan kepada publik melalui kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025.

Gambar 19. Liputan Kompas TV Penyampaian Capaian Kinerja Tahun 2025 pada acara Refleksi Akhir tahun

Salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran dan pengelolaan kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan melalui aplikasi Evakip (E-Monev SAKIP) yang digunakan sejak tahun 2020, dan kemudian dikembangkan menjadi platform terintegrasi SATRIA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Riau) yang mencakup fungsi perencanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Aplikasi ini telah direplikasi dan digunakan oleh seluruh satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau serta beberapa Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, dan sedang dikembangkan kembali oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sejalan dengan perubahan IKU Renstra 2025–2029, aplikasi Evakip saat ini sedang ditingkatkan (*upgrade*) untuk mendukung kebutuhan pengukuran indikator kinerja.

Gambar 20. Aplikasi SATRIA pengembangan dari aplikasi Evakip

Gambar 21. Dialog Interaktif Prima (Pengadilan Tinggi Riau Menyapa)

Selain pemanfaatan teknologi informasi, salah satu program strategis Pengadilan Tinggi Riau adalah Dialog Interaktif PRIMA (Pengadilan Tinggi Riau Menyapa) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur peradilan.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau juga didukung oleh berbagai faktor strategis lainnya yang diwujudkan melalui program, kebijakan, serta kegiatan organisasi. Faktor-faktor tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 37. Faktor Keberhasilan dan Program Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja

Faktor keberhasilan organisasi	Program / Kebijakan / Kegiatan Pendukung
1. Komitmen pimpinan dalam mendorong peningkatan kinerja peradilan sehingga seluruh unit kerja bergerak secara terarah dan konsisten dalam mencapai target kinerja.	▪ Implementasi Program AMPUH Badilum sebagai kerangka penguatan kinerja peradilan ▪ Optimalisasi Implementasi SOP ▪ Optimalisasi perencanaaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja melalui aplikasi EVAKIP dan SATRIA. ▪ Penguatan fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja
2. Optimalisasi transformasi digital peradilan yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses peradilan.	▪ Implementasi e-Court, e-Berpadu, SIPP ▪ Digitalisasi proses administrasi perkara dan layanan pengadilan ▪ Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan integrasi aplikasi peradilan
3. Penguatan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pembangunan budaya integritas organisasi.	▪ Implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM ▪ Program penguatan Integritas, dan kebijakan penguatan Integritas melalui Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Riau ▪ Penguatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kinerja ▪ Peningkatan keterbukaan informasi publik dan publikasi putusan melalui Direktori putusan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik peradilan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.	▪ Optimalisasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ▪ Penerapan standar pelayanan pengadilan secara konsisten ▪ Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ▪ Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut masukan masyarakat
5. Penguatan profesionalisme dan kompetensi aparatur peradilan dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan berintegritas	▪ Pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur melalui diklat, FGD, dan pembinaan teknis ▪ Implementasi sistem penilaian kinerja ASN melalui SIKEP ▪ Program internal peningkatan kapasitas seperti Dialog Interaktif Prima (Pengadilan Tinggi Riau Menyapa)
6. Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya organisasi yang akuntabel dan berbasis kinerja	▪ Penguatan pengelolaan keuangan melalui OM-SPAN dan sistem pengelolaan keuangan negara ▪ Peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui Monev Kementerian Keuangan ▪ Penguatan pengelolaan BMN melalui aplikasi e-Sadewa

Selain faktor keberhasilan tersebut, dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2025 masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi organisasi. Kendala tersebut pada umumnya berkaitan dengan proses adaptasi terhadap sistem baru, dinamika regulasi, serta proses transisi indikator kinerja pada periode perencanaan strategis yang baru. Namun demikian, berbagai langkah perbaikan dan tindak lanjut telah dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan pencapaian kinerja tetap optimal.

Kendala yang dihadapi beserta langkah solusi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38. Kendala dan solusi dalam pencapaian kinerja

No	Kinerja	Kendala yang Dihadapi	Dampak terhadap Kinerja	Solusi / Tindak Lanjut
1	Digitalisasi Layanan Perkara (Implementasi e-Berpadu)	▪ Implementasi efektif baru berjalan Semester II 2025 ▪ Adaptasi satuan kerja dan stakeholder belum merata	Pengajuan e-Berpadu belum optimal	▪ Percepatan digitalisasi pidana ▪ Monitoring bulanan melalui Evakip
2	Pengelolaan SDM dan Profesionalitas Aparatur	▪ Pengukuran baru pertama kali diterapkan ▪ Penyesuaian penginputan data SIKEP ▪ Kesempatan diklat belum merata ▪ Konsistensi pemutakhiran data belum optimal	▪ Potensi nilai belum mencerminkan kondisi riil sepenuhnya ▪ Ketimpangan skor antar pegawai	▪ Pelatihan teknis SIKEP dan manajemen data kepegawaian ▪ Inventarisisr diklat berbasis kebutuhan kompetensi ▪ Penunjukan PIC pemutakhiran data ▪ Monitoring IP ASN
3	Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	▪ Dinamika regulasi penganggaran di tengah tahun ▪ Perbedaan pemahaman teknis pengukuran Monev Kemenkeu ▪ Masa adaptasi sistem baru	▪ Membutuhkan penyesuaian cepat perencanaan ▪ Potensi deviasi jika monitoring tidak optimal	▪ Penguatan kapasitas perencanaan berbasis output ▪ Forum koordinasi rutin unit perencanaan & keuangan ▪ Early warning system deviasi Hal III DIPA
4	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	▪ Pengukuran baru pertama kali diterapkan ▪ Kapasitas SDM pengelola aset perlu ditingkatkan ▪ Pemutakhiran dan validasi data BMN belum optimal	▪ Potensi ketidaksesuaian data asset ▪ Risiko nilai belum maksimal	▪ Pelatihan teknis pengelolaan BMN & aplikasi e-Sadewa ▪ Audit internal & rekonsiliasi berkala ▪ Tim validasi data aset
5	Komparasi Kinerja dengan Tingkat Nasional	▪ Capaian rata-rata 34 Pengadilan Tinggi dilingkungan peradilan umum secara nasional masih lebih tinggi ▪ Ada Gap pada indikator tertentu	Secara komparatif belum sepenuhnya unggul	▪ Identifikasi gap indikator ▪ Action plan peningkatan berbasis comparative performance ▪ Penguatan budaya kinerja berbasis data
6	Transisi IKU Renstra 2025–2029	▪ Tahun pertama penerapan IKU baru ▪ Tidak semua indikator dapat dibandingkan historis ▪ Perbedaan target tahun pertama dan jangka menengah ▪ Beberapa indikator belum terintegrasi dengan aplikasi pengukuran kinerja Evakip karena berbeda lembaga	▪ Analisis tren terbatas pada sebagian indikator ▪ Potensi interpretasi capaian kurang komprehensif	▪ Pengumpulan data ▪ Penyempurnaan cascading indikator ▪ Upgrade sistem pengukuran kinerja Evakip agar terintegrasi dengan sistem (SIPP, Sisuper, OM-SPAN, Monev Keuangan, SIKEP, e-Sadewa)

7. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

a. Efisiensi Anggaran

Untuk mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja sasaran strategis dengan realisasi belanja yang mendukung sasaran strategis tersebut. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi belanja pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 39. Efisiensi anggaran terhadap kinerja

Anggaran						Kinerja			Efisiensi
	Sumber Anggaran	Pagu	Total	Realisasi	%		Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	
1	DIPA (03) BADILUM	248.014.000	281.940.000	281.622.700	100%	1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	102,2%	2%
2	BIAYA PROSES	33.926.000				2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	102,9%	3%
3	DIPA (01) BUA)	32.752.762.000	32.752.762.000	32.707.207.523	99,86%	3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	104,6%	5%

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan sebagai berikut :

b. Kinerja Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 didukung oleh anggaran DIPA (03) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan pagu sebesar Rp. 248.014.000 (Dua ratus empat puluh delapan juta empat belas ribu rupiah) dan Biaya Proses sebesar Rp. 33.926.000 (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pada Tahun 2025, realisasi anggaran DIPA (03) ditambah Biaya Proses mencapai 100%, sementara capaian kinerja Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 masing-masing sebesar 102,2% dan 102,3%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran, dengan tingkat efisiensi masing-masing sebesar 2% dan 3%.

c. Kinerja Sasaran Strategis 3 didukung oleh anggaran DIPA (01) Program Dukungan Manajemen dengan pagu sebesar Rp. 32.752.762.000 (Tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah). Realisasi anggaran DIPA (01) sebesar 99,86%, sedangkan capaian kinerja Sasaran Strategis 3 tercatat sebesar 104,6%. Dengan demikian, capaian kinerja Sasaran Strategis 3 juga lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran, dengan tingkat efisiensi sebesar 5%.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Sasaran Strategis 1 dan 2 yang didukung oleh DIPA (03), serta Sasaran Strategis 3 yang didukung oleh DIPA (01), sama-sama mencapai kinerja di atas 100% dengan tingkat realisasi anggaran di sekitar atau di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menghasilkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan, sehingga mendukung terwujudnya peradilan yang berkualitas dan manajemen peradilan yang profesional.

b. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Untuk menilai efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam mendukung pencapaian kinerja, dilakukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja sasaran strategis dengan persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia sesuai standar yang ditetapkan. Berdasarkan buku “Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Bangunan Gedung

Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan" yang diberlakukan tahun 2007 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 143/KMA/SK/VIII/2007, dijelaskan bahwa standar Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum maksimal berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) orang. Jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2025 berjumlah 92 (sembilan puluh dua) orang, dengan rincian formasi pegawai dan formasi standar adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian formasi SDM Pengadilan Tingkat Banding

Formasi Standar Pegawai Pengadilan Tingkat Banding		Formasi Pegawai Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025	
Jabatan	Jumlah	Jabatan	Jumlah
Ketua	1	Ketua	1
Wakil	1	Wakil	1
Hakim	23	Hakim Tinggi	19
Panitera/Sekretaris	1	Hakim Adhoc	3
Wakil Panitera	1	Panitera	1
Wakil Sekretaris	1	Sekretaris	1
Panmud	3	Kepala Bagian	2
Kasubbag	3	Panmud	4
Panitera Pengganti	32	Kepala Subbagian	4
Staf Kepaniteraan	15	Panitera Pengganti	16
Staf Kesekretariatan	14	Pejabat Fungsional	8
Staf lain & PPNPN	36	Pelaksana	21
		PPPK	11
Total	**131**	**Total**	**92**

Hasil perbandingan antara capaian kinerja dan persentase ketersediaan SDM di Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 41. Efisiensi SDM terhadap kinerja

Jumlah SDM Tahun 2025	Standar Jumlah SDM	Perbandingan Jumlah SDM dengan Standar	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Efisiensi
92 orang	131 orang	70%	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	102,2%	32%
			2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	102,9%	33%
			3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	104,6%	34%

Berdasarkan tabel di atas, ketersediaan pegawai Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2025 baru mencapai sekitar 70% dari standar jumlah maksimum pegawai. Meskipun demikian, dengan sumber daya manusia yang terbatas tersebut, Pengadilan Tinggi Riau tetap mampu mencapai kinerja Sasaran Strategis 1, Sasaran Strategis 2, dan Sasaran Strategis 3 masing-masing sebesar 102,2%, 102,9%, dan 104,6%. Capaian tersebut menunjukkan tingkat efisiensi sumber daya manusia masing-masing sebesar 32%, 33%, dan 34%.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Riau telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Walaupun jumlah pegawai belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan, pemanfaatan sumber daya yang tersedia mampu mendukung pencapaian kinerja yang optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Riau sebagaimana yang dijabarkan dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Riau memperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum. Selain anggaran dari APBN, untuk kinerja pengelolaan administrasi perkara perdata didukung dengan Biaya Proses Perkara Perdata. Anggaran APBN maupun Biaya Proses digunakan untuk mendukung kegiatan guna tercapainya masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

DIPA (01) BUA adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai kebutuhan administrasi umum peradilan, meliputi belanja pegawai, belanja barang operasional perkantoran, belanja modal, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Pada awal tahun 2025, pagu Anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 25.468.047.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah), namun karena terjadi revisi penambahan anggaran, pagunya menjadi Rp. 32.265.623.000 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Realisasi anggaran DIPA (01) BUA mencapai Rp. 32.955.210.223 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 99,86% dari total pagu anggaran. Anggaran DIPA (01) mendukung Program Dukungan Manajemen dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang terdiri dari :
   - Belanja Pegawai, sebesar Rp. 28.474.590.000 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
   - Belanja Barang, sebesar Rp. 3.791.033.000 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah)
b. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung, terdiri dari Belanja Modal, sebesar Rp. 487.139.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Tabel 42. Reliasasi DIPA (01)

DIPA	Program	Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
DIPA (01) BUA	Dukungan Manajemen	1. Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1. Belanja Pegawai	Rp 28.474.590.000	Rp 28.430.956.541	99,85%	Rp 43.633.459	0,15%
			2. Belanja Barang	Rp 3.791.033.000	Rp 3.790.733.046	99,99%	Rp 299.954	0,01%
		2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	3. Belanja Modal	Rp 487.139.000	Rp 485.517.936	99,67%	Rp 1.621.064	0,33%
Total				**Rp 32.752.762.000**	**Rp 32.707.207.523**	**99,86%**	**Rp 45.554.477**	**0,14%**

Realisasi DIPA (01) pada tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2021-2025 dijelaskan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 43. Realisasi DIPA (01) tahun 2021-2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	2025	Rp. 37.752.762.000	Rp. 32.707.207.523	99,86%	Rp. 45.554.477	0,14%
2.	2024	Rp. 26.848.880,000	Rp. 26.842.869.097	99,98%	Rp. 6.010.903	0,02%
3.	2023	Rp. 25.968.301.000	Rp. 25.966.518.908	99,92%	Rp. 19.782.092	0,08%
4.	2022	Rp. 24.512.067.000	Rp. 24.476.206.678	99,85%	Rp. 35.8690.332	0,15%
5.	2021	Rp. 24.360.296.000	Rp. 24.278.241.068	99,70%	Rp. 82.054.932	0,30%

Grafik 6. Perbandingan realisasi DIPA (01) Tahun 2021-2025

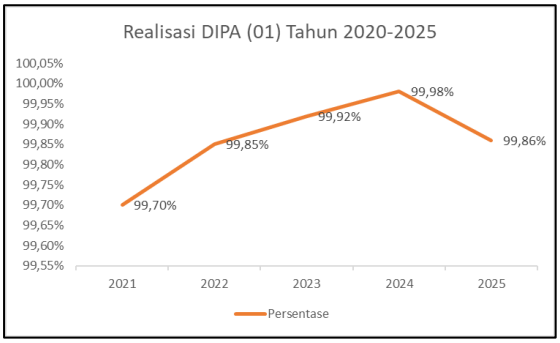

Grafik diatas terlihat bahwa realisasi DIPA (01) tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya mengalami penurunan sangat kecil dibanding 2024 dan 2023, namun secara umum tetap berada pada level tinggi dan stabil dengan realisasi melebihi 99%.

2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM (BADILUM)

DIPA (03) Badilum adalah anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan penanganan perkara, pembinaan teknis peradilan, serta pelaksanaan program-program strategis yang secara langsung menunjang fungsi peradilan umum. Pada awal tahun 2025, pagu Anggaran DIPA (03) Badilum sebesar Rp. 330.514.000 (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah), namun karena adanya efisiensi pada anggaran perjalanan dinas maka pagunya menjadi Rp. 248.014.000 (dua ratus empat puluh delapan juta empat belas ribu rupiah).
Realisasi anggaran DIPA (03) Badilum mencapai Rp. 248.002.700 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 100% dari pagu anggaran Anggaran DIPA (03) mendukung Program Penegakan dan Pelayanan Hukuum untuk kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 44. Realisasi DIPA (03)

DIPA	Program	Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
DIPA (03) BADILUM	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Belanja Barang	Rp 248.014.000	Rp 248.002.700	100%	Rp 11.300	0%
			Total	**Rp 248.014.000**	**Rp 248.002.700**	**100,00%**	**Rp 11.300**	**0,00%**

Peningkatan Realisasi DIPA (03) dibandingkan tahun -tahun sebelumnya, periode tahun 2021-2025, digambarkan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 45. Realisasi DIPA (03) Tahun 2021-2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	2025	Rp. 248.014.000	Rp. 248.002.700	100%	Rp. 11.300	0%
2.	2024	Rp. 235.514.000	Rp. 235.483.834	99,99%	Rp. 30.166	0,01%
3.	2023	Rp. 235.514.000	Rp. 235.503.651	100%	Rp. 10.349	0%
4.	2022	Rp. 428.790.000	Rp. 428,180,094	99,86%	Rp. 609.906	0,14%
5.	2021	Rp. 433.260.000	Rp. 432.712.595	99,87%	Rp. 547.405	0,13%

Grafik 7. Realisasi DIPA (03) Tahun 2021-2025

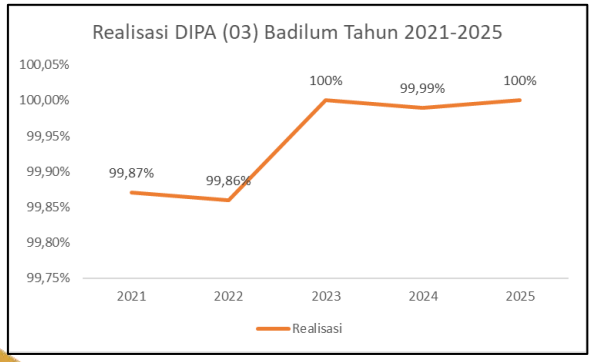

Anggaran yang bersumber dari DIPA (01) BUA dan DIPA (03) Badilum digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Berdasarkan perjanjian tersebut, ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai dengan dukungan anggaran, sebagai berikut:

a. Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern, didukung oleh anggaran DIPA (03) Badilum melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, juga didukung oleh anggaran DIPA (03) Badilum melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

b. Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional, didukung oleh anggaran DIPA (01) BUA melalui Program Dukungan Manajemen, dengan dua kegiatan, yaitu :
   - Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama; dan
   - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Rincian anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 46. Rincian anggaran pendukung capaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	DIPA	Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1 Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1 Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	DIPA (03) Badilum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 248.014.000	Rp 248.002.700	100%
2 Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	DIPA (01) BUA	Dukungan Manajemen	1 Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 2 Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Rp 32.752.762.000	Rp 32.707.207.523	99,86%
			Total		**Rp 33.000.776.000**	**Rp 32.955.210.223**	**99,86%**

3. BIAYA PROSES

Biaya proses perkara perdata adalah biaya yang dibayarkan untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara. Biaya ini digunakan untuk pembelian alat tulis kantor mendukung penyelesaian perkara tepat waktu, pembuatan putusan untuk dimasukkan ke Direktori putusan, serta untuk pengiriman salinan putusan perkara. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.

Dengan demikian biaya proses ini mendukung tercapainya indikator kienerja pada :

1. Sasaran Strategis 1, pada indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju, dan Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
2. Sasaran Strategis 2 pada indikatorr Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025, jumlah Biaya Proses yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Riau sebesar Rp. 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut ditambah dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), sehingga total Biaya Proses yang tersedia menjadi Rp. 33.926.000 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dari total biaya proses yang diterima tersebut, realisasi penggunaan mencapai Rp. 33.620.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,09%. Rincian penerimaan dan realisasi biaya proses tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 47. Penerimaan dan realisasi Biaya Proses Tahun 2025

No	Periode	Penerimaan	Pengeluaran	Realisasi	Saldo
	Saldo Tahun 2024	**326.000,00**			
1	Januari	3.600.000,00	3.380.000,00	93,89%	546.000,00
2	Februari	1.500.000,00	1.740.000,00	116%	306.000,00
3	Maret	2.700.000,00	2.640.000,00	97,78%	366.000,00
4	April	2.250.000,00	2.210.000,00	98,22%	406.000,00
5	Mei	2.100.000,00	2.200.000,00	104,76%	306.000,00
6	Juni	2.550.000,00	2.450.000,00	96,07%	406.000,00
7	Juli	2.400.000,00	2.560.000,00	106,67%	246.000,00
8	Agustus	3.600.000,00	3.420.000,00	95%	426.000,00
9	September	4.200.000,00	4.220.000,00	100,47%	406.000,00
10	Oktober	2.250.000,00	2.370.000,00	105,33%	286.000,00
11	November	3.450.000,00	3.330.000,00	96,52%	406.000,00
12	Desember	3.000.000,00	3.100.000,00	103,33%	306.000,00
	Total	**33.926.000,00**	**33.620.000,00**	**99,09%**	
	Saldo Tahun 2025				**306.000,00**

Bab IV
Penutup

A. KESIMPULAN
B. REKOMENDASI

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama Tahun 2025, yang sekaligus merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029. Penyusunan laporan ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Riau dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau menunjukkan hasil yang sangat baik. Rata-rata capaian kinerja organisasi mencapai 103,2%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Seluruh sasaran strategis, dapat dicapai dengan tingkat capaian yang tinggi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada aspek kinerja teknis peradilan, Pengadilan Tinggi Riau mampu mempertahankan konsistensi kinerja yang sangat baik, khususnya dalam penyelesaian perkara tepat waktu, pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju, serta publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Seluruh perkara yang diputus pada tahun 2025 sebanyak 1.203 perkara berhasil diselesaikan tepat waktu dengan capaian 100%, melampaui target yang telah ditetapkan. Demikian pula pengiriman salinan putusan serta unggah putusan pada Direktori Putusan yang seluruhnya mencapai 100%, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar pelayanan peradilan serta konsistensi kinerja yang terjaga secara berkelanjutan.
2. Pada aspek transformasi digital peradilan, pemanfaatan layanan peradilan berbasis elektronik menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Seluruh perkara perdata tingkat banding pada tahun 2025 telah diajukan melalui e-Court, sehingga capaian indikator ini mencapai 100% dan melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, implementasi e-Berpadu dalam pengajuan perkara pidana tingkat banding telah mulai berjalan efektif sejak semester II tahun 2025 dengan tingkat pemanfaatan sebesar 52%, melampaui target sebesar 50%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi layanan peradilan terus berkembang dan mendukung peningkatan efisiensi serta transparansi proses peradilan.
3. Dalam aspek pelayanan publik, kualitas layanan peradilan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hasil survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan tahun 2025 memperoleh nilai 3,96 dari target 3,85, dengan capaian 102,9% dan berada pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pengadilan telah dilaksanakan secara profesional, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
4. Pada aspek tata kelola organisasi dan manajemen sumber daya, Pengadilan Tinggi Riau juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Profesionalitas ASN sebesar 81,58, nilai IKPA DIPA (01) dan DIPA (03) yang masing-masing mencapai nilai maksimal 100, nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 85 yang melampaui target, serta Indeks Pengelolaan Aset sebesar 3,2 yang juga melampaui target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun aset negara, telah dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan efisien.
5. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja yang melampaui target berhasil diraih dengan tingkat realisasi anggaran yang sangat baik, yaitu 99,86% pada DIPA (01) dan 100% pada DIPA (03). Di sisi lain, ketersediaan sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Riau baru mencapai sekitar 70% dari standar kebutuhan organisasi, namun kondisi tersebut tidak menghambat pencapaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya organisasi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan kinerja yang optimal meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

Meskipun secara umum capaian kinerja organisasi berada pada kategori sangat baik, masih terdapat beberapa area perbaikan yang perlu menjadi perhatian pada periode berikutnya, anatara lain :

1. Salah satunya adalah optimalisasi implementasi e-Berpadu pada perkara pidana tingkat banding. Meskipun capaian indikator ini telah melampaui target, tingkat pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal karena implementasinya baru berjalan efektif pada semester II tahun 2025, sehingga masih terdapat sebagian perkara yang diajukan melalui mekanisme konvensional.
2. Selain itu, beberapa indikator baru dalam Renstra 2025–2029, seperti Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Pengelolaan Aset (IPA), masih berada pada tahap awal implementasi sehingga masih memerlukan penguatan sistem pengelolaan data, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyempurnaan mekanisme pengukuran agar dapat menggambarkan kinerja organisasi secara lebih komprehensif.
3. Dari sisi komparasi dengan capaian rata-rata Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum secara nasional, meskipun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau telah memenuhi bahkan melampaui target internal yang ditetapkan, secara komparatif masih terdapat ruang peningkatan agar capaian kinerja organisasi dapat lebih kompetitif dan melampaui capaian rata-rata nasional secara berkelanjutan.

Keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 didukung oleh berbagai faktor strategis, antara lain komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam menjaga disiplin, integritas, dan budaya kinerja organisasi; optimalisasi transformasi digital peradilan melalui pemanfaatan e-Court, e-Berpadu, dan SIPP; penguatan tata kelola organisasi melalui pembangunan zona integritas serta pengawasan internal; peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat; serta penguatan profesionalisme aparatur melalui berbagai program pembinaan dan peningkatan kapasitas.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja melalui aplikasi Evakip (E-Monev SAKIP) yang dikembangkan menjadi platform terintegrasi SATRIA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Riau) juga menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pengelolaan kinerja organisasi secara lebih sistematis, terukur, dan terintegrasi. Aplikasi Evakip tersebut juga telah direplikasi dan dimanfaatkan oleh satuan kerja pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau serta oleh beberapa Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan umum, dan saat ini aplikasi tersebut dikembangkan kembali oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,, sehingga menjadi salah satu praktik baik (best practice) dalam penguatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan peradilan.

Keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 juga tercermin dari berbagai penghargaan dan prestasi yang diraih, baik di tingkat pusat maupun wilayah, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kualitas kinerja organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penghargaan tersebut menjadi indikator eksternal yang memperkuat bahwa upaya peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Riau telah memberikan hasil yang nyata dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 berada pada kategori sangat baik, dengan sebagian besar indikator kinerja berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja organisasi telah berjalan secara efektif dan berorientasi pada hasil.

Kedepan, Pengadilan Tinggi Riau akan terus memperkuat peningkatan kinerja melalui optimalisasi implementasi sistem peradilan berbasis elektronik, penguatan tata kelola organisasi dan pengelolaan sumber daya yang lebih akuntabel, peningkatan profesionalisme aparatur peradilan, serta penguatan budaya kinerja berbasis data dan evaluasi berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja organisasi serta mendukung terwujudnya peradilan yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025, serta dengan memperhatikan berbagai keberhasilan dan area yang masih memerlukan penguatan, maka beberapa rekomendasi strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Implementasi Sistem Peradilan Elektronik
   Pengadilan Tinggi Riau perlu terus mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem peradilan berbasis elektronik, khususnya implementasi e-Berpadu pada perkara pidana tingkat banding, melalui penguatan koordinasi dengan pengadilan pengaju, peningkatan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, serta penguatan dukungan teknis agar seluruh proses pengajuan perkara pidana dapat sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik.

2. Penguatan Pengelolaan Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Organisasi
   Pengembangan sistem pengelolaan kinerja melalui Evakip dan platform SATRIA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Riau) perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan indikator kinerja yang baru agar mampu mendukung integrasi proses perencanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara lebih komprehensif.

3. Peningkatan Profesionalitas Aparatur dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
   Mengingat ketersediaan sumber daya manusia masih berada pada kisaran sekitar 70% dari kebutuhan ideal organisasi, diperlukan strategi penguatan kapasitas aparatur melalui program pembinaan, pelatihan teknis dan manajerial, serta optimalisasi distribusi tugas dan fungsi agar kinerja organisasi tetap terjaga secara optimal.

4. Penguatan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi
   Upaya penguatan tata kelola organisasi perlu terus dilaksanakan melalui konsistensi pembangunan Zona Integritas, peningkatan pengawasan internal, serta penguatan budaya integritas dan disiplin aparatur guna memastikan terwujudnya organisasi peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat
   Pengadilan Tinggi Riau perlu terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta optimalisasi mekanisme survei kepuasan pengguna layanan sebagai instrumen evaluasi berkelanjutan untuk memastikan layanan peradilan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

6. Penguatan Sistem Pengelolaan Data Kinerja Organisasi
   Beberapa indikator baru dalam Renstra 2025–2029 seperti Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) memerlukan penguatan sistem pengumpulan dan pengelolaan data. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pengukuran, peningkatan kapasitas pengelola data, serta integrasi sistem informasi agar pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan akuntabel.

7. Peningkatan Daya Saing Kinerja Secara Nasional
   Untuk meningkatkan posisi kinerja secara komparatif di tingkat nasional, Pengadilan Tinggi Riau perlu terus memperkuat inovasi organisasi, meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja secara berbasis data, serta mengoptimalkan implementasi program-program strategis Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan sehingga tidak hanya melampaui target internal, tetapi juga mampu mencapai capaian kinerja yang lebih unggul secara nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi
Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (lama)
Lampiran 3 : Indikator Kinerja Utama (baru)
Lampiran 4 : Matrik Rancangan Renstra Tahun 2025-2029
Lampiran 5 : Matrik Renstra Tahun 2025-2029
Lampiran 6 : Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU lama)
Lampiran 7 : Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU baru)
Lampiran 8 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (IKU lama)
Lampiran 9 : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (IKU baru)
Lampiran 10 : Capaian Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 3 (IKU lama)
Lampiran 11 : Capaian Kinerja Periode Januari s.d Oktober 2025 (IKU lama)
Lampiran 12 : Capaian Kinerja Triwulan IV (IKU baru)
Lampiran 13 : Capaian Kinerja Periode Januari s.d Desember 2025 (IKU baru)
Lampiran 14 : Analisis Efisiensi Anggaran
Lampiran 15 : Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia
Lampiran 16 : Checklist Reviu
Lampiran 17 : SK Tim Penyusun Laporan Kinerja

Lampiran 1 : Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI RIAU

Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (lama)

PENGADILAN TINGGI RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU
NOMOR : W4.U/ 4726 /OT.01.1 /4/2022

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Riau dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa sehubungan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 173/SEK/SK/I/2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Riau.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI RIAU.
PERTAMA	:	Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022.
KEDUA	:	Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau 2020 - 2024.
KETIGA	:	Menetapkan dan memberlakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 25 April 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

PENGADILAN TINGGI RIAU

PANUSUNAN HARAHAP

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI RIAU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}}$ 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan

			Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		Laporan Tahunan
		Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\textbf{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Index Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	**Index Persepsi Kepuasan Stakeholder** **Catatan :** • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}}$ **100%** **Catatan :** • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}}$ **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	**Catatan :** • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.		Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} \textbf{100\%}$ **Catatan :** • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1 : Indikator

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Yakni "Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding Paling lambat dalam waktu tiga 3 (bulan)".
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Yakni "Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding Paling lambat dalam waktu tiga 3 (bulan) "
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu sesuai Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Yakni "Penyelesaian Perkara Tipikor Tepat Waktu adalah 2 (dua) bulan".
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Definisi	Mengukur Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka masyarakat pencari keadilan akan semakin puas atas Putusan di Tingkat Banding.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Perkara (Perdata, Pidana, Pidana Khusus) yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	B= Jumlah Perkara (Perdata, Pidana, Pidana Khusus) yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Definisi	Mengukur Persentase stakeholder (Pengadilan Tk. Pertama, Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Riau) yang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Riau.
Formula Perhitungan	Survey Kepuasan masyarakat dari aplikasi SISUPER Mahkamah Agung RI
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Aplikasi SISUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) Mahkamah Agung.
Periode Pengambilan Data	Triwulanan.
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
	2. # Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
	3. # Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
	4. # Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	5. # Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	6. # Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	7. # Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 2

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pegaju Tepat Waktu mengacu pada SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, dan yakni Selama 3 Hari setelah Putusan Perkara diputus.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	B=Jumlah Salinan Putusan Perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 2

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pegaju Tepat Waktu mengacu pada SOP Pengadilan Tinggi Riau yakni Selama 3 Hari setelah Putusan Perkara diputus.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	B=Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 2

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pegaju Tepat Waktu mengacu pada SOP Pengadilan Tinggi Riau yakni Selama 3 Hari setelah Putusan Perkara diputus.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	B=Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Lampiran 3: Indikator Kinerja Utama (baru)

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU
NOMOR: 1588/KPT.W4-U/RA1.3/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Riau dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa sehubungan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);

3. Undang ...

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029;
13. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025-2029.

KESATU : Melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025.

KEDUA : ...

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 – 2029.

KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025-2029 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimanan mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 November 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

DIAH SULASTRI DEWI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Nomor : 1588/KPT.W4-U/RA1.3/XI/2025
Tanggal : 3 November 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025 – 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penye-lesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}$ **X 100%** **Catatan:** 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 3. Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya **Dasar Hukum:** 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 2. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 3. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 4. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. 5. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ **Catatan:** Kinerja pengiriman salinan putusan perkara yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan perkara yang telah diminutasi}} \times 100\%$ **Catatan:** Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. **Dasar Hukum:** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan		
		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan } e\text{-Court}}{\text{jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ **Catatan:** 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui *e-Court* dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. **Dasar Hukum:** 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan } e\text{-Berpadu}}{\text{jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ **Catatan:** 1. Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			2. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. **Dasar Hukum:** 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	**Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan** **Catatan:** Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	**Catatan:** Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) **Dasar Hukum:** Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksa-naan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	**Catatan:** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%); b. Penyerapan Anggaran (20%); c. Penyelesaian Tagihan (10%); d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); f. Belanja Kontraktual (10%); g. Pengelolaan UP dan TUP (10%);	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

			h. Capaian Output (25%). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum:** Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	**Catatan:** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%); b. Penyerapan Anggaran (20%); c. Penyelesaian Tagihan (10%); d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); f. Belanja Kontraktual (10%); g. Pengelolaan UP dan TUP (10%); h. Capaian Output (25%). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum:** Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	**Catatan:** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

			kinerja tahun berjalan.		
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	**Catatan:** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	**Catatan:** Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum:** • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi Esadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

DIAH SULASTRI DEWI

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1 : Indikator

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, yakni dalam waktu tiga 3 (tiga) bulan dan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Yakni "Penyelesaian Perkara Tipikor Tepat Waktu adalah 2 (dua) bulan".
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip dan Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju
Definisi	Mengukur Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju mengacu pada SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, yakni selama 14 Hari sejak Putusan diucapkan
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirimkan Kepada Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu
	B=Jumlah Perkara yang Diputus
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip dan Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan
Definisi	Mengukur Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan adalah paling lambat pada saat perkara diminutasi.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Putusan Perkara yang Diunggah pada Direktori Putusan
	B= Jumlah Putusan Perkara yang Telah Diminutasi
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court*
Definisi	Mengukur Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan *e-Court*
	B= Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Berpadu*
Definisi	Mengukur Persentase Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Berpadu* mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan *e-Berpadu*
	B= Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diajukan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 2

Kamus KPI	
Nama KPI	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan
Definisi	Mengukur Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan (Pengadilan Tk. Pertama, Masyarakat Pencari Keadilan, Advokat, Mahasiswa yang melakukan penelitian, masyarakat yang mencari informasi peradilan) yang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tk. Banding.
Formula Perhitungan	Survey Kepuasan masyarakat dari aplikasi SISUPER Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Satuan Digunakan	# Indeks
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
Sumber Data	Aplikasi SISUPER Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Periode Pengambilan Data	Triwulan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	1. # Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
	2. # Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju
	3. # Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan
	4. # Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court*
	5. # Persentase Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Berpadu*

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 3

Kamus KPI	
Nama KPI	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau
Definisi	Mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
Formula Perhitungan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dari aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI
Satuan Digunakan	# Indeks
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI
Periode Pengambilan Data	Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. # Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 3

Kamus KPI	
Nama KPI	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Definisi	Mengukur Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi mengacu pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Formula Perhitungan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dari Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan RI
Satuan Digunakan	# Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan RI
Periode Pengambilan Data	Bulanan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. # Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 3

Kamus KPI	
Nama KPI	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Definisi	Mengukur Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengacu pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Formula Perhitungan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dari Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan RI
Satuan Digunakan	# Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan RI
Periode Pengambilan Data	Bulanan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. # Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 3

Kamus KPI	
Nama KPI	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Definisi	Mengukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dari Aplikasi Monev Kemenkeu Kementerian Keuangan RI
Satuan Digunakan	# Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Aplikasi Monev Kemenkeu Kementerian Keuangan RI
Periode Pengambilan Data	Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. # Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 3

Kamus KPI	
Nama KPI	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Definisi	Mengukur Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dari Aplikasi Monev Kemenkeu Kementerian Keuangan RI
Satuan Digunakan	# Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Aplikasi Monev Kemenkeu Kementerian Keuangan RI
Periode Pengambilan Data	Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. # Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 3

Kamus KPI	
Nama KPI	Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau
Definisi	Mengukur Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Formula Perhitungan	Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau dari Aplikasi *e-Sadewa* Mahkamah Agung RI
Satuan Digunakan	# Indeks
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber Data	Aplikasi Aplikasi *e-Sadewa* Mahkamah Agung RI
Periode Pengambilan Data	Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. # Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Lampiran 4 : Matrik Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

MATRIKS RANCANGAN RENSTRA PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025-2029

TUJUAN			SASARAN									STRATEGIS				
NO	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH		URAIAN		INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Dana (dalam juta rupiah)
							2025	2026	2027	2028	2029					
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	97%	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	97%	97%	97%	97%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelengaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 layanan	130.633
		97%			2	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	97%	97%	97%	97%					
		100%			3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		40%			4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40%	40%	40%	40%	40%					
		97%			5	Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	97%	97%	97%	97%	97%		Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana	5 layanan	1.835
2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tingkat banding tepat waktu	5.000 perkara	1.950
		100%			2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%			3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

Lampiran 5: Matrik Renstra Tahun 2025-2029

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program /Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								248.014	348.369	380.000	410.000	440.000
	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern											
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	97%	97%	97%	97%	97%					
	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.3. Persentase putusan yang diunggah ke direktori putusan	97%	97%	97%	97%	97%	97%					
	1.4. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
	1.5. Persentase perkara pidana tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	82%	50%	90%	90%	90%	90%					
	2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik											
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85					
Program Dukungan Manajemen/ Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama/ Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung								32.752	32.595	33.000	33.500	34.000
	3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional											
	3.1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	83,6	78	85	85	85	85					
	3.2. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98	98	98	98	98	98					
	3.3. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98	98	98	98	98	98					
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	80	80	80	80	80					
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	80	80	80	80	80					
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3	3	3	3	3	3					

Lampiran 6 : Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU lama)

PENGADILAN TINGGI RIAU
RENCANA KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 44 /KPT.W4-U/RA1.9/I/2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%
		2	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Pekanbaru, 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

SISWANDRIYONO

Lampiran 7 : Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU baru)

PENGADILAN TINGGI RIAU
REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 1643/KPT.W4-U/RA1.9/IX/2025

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan				
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%
		2	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%
		4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*	99%
		5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan *e-Berpadu*	50%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.85
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80

		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80
		6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3

Pekanbaru, 3 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Lampiran 8 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (IKU lama)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI RIAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 17 /KPT.W4-U/RA1.10/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	**Ketua Pengadilan Tinggi Riau**
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.	**Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 17 /KPT.W4-U/RA1.10/I/2025

PENGADILAN TINGGI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%
		2	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	366.459.000
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	25.101.588.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	330.514.000

Pekanbaru, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Lampiran 9: Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (IKU baru)

PERNYATAAN REVISI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI RIAU

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 1645/KPT.W4-U/RA1.10/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 3 November 2025

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	**Ketua Pengadilan Tinggi Riau**
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.	**Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 1645/KPT.W4-U/RA1.10/XI/2025

PENGADILAN TINGGI RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan				
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%
		2	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%
		4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*	99%
		5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan *e-Berpadu*	50%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.85
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80
		6	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3

Kegiatan		Anggaran
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	487.139.000
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	32.265.623.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	248.014.000

Pekanbaru, 3 November 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Lampiran 10 : Capaian Kinerja Triwulan 1 s.d Triwulan 3 (IKU lama)

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	47,60%	119,0%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	99,76%	102,8%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			**105,6%**
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			**100,0%**
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2			**102,8%**

Pekanbaru, 10 April 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

PENGADILAN TINGGI RIAU

Asli Ginting

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	57,89%	144,7%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	99,94%	103,0%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			**110,8%**
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			**100,0%**
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2			**105,4%**

Pekanbaru, 2 Juli 2025
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

PENGADILAN TINGGI RIAU

Agus Rusianto

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	41%	102,5%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	98,74%	101,8%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				**102,1%**
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				**100,0%**
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2				**101,0%**

Pekanbaru, 2 Oktober 2025
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

PENGADILAN TINGGI RIAU

Agus Rusianto

Lampiran 11 : Capaian Kinerja Periode Januari s.d Oktober 2025 (IKU lama)

PENCAPAIAN KINERJA BULAN JANUARI s.d. OKTOBER
TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	35,60%	89,0%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	98,74%	101,8%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			**99,4%**
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			**100,0%**
			Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2			**99,7%**

Pekanbaru, 3 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

PENGADILAN TINGGI RIAU

Diah Sulastri Dewi

Lampiran 12 : Capaian Kinerja Triwulan IV (IKU baru)

PENCAPAIAN KINERJA BULAN TRIWULAN IV
TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan						
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	100,00%	103,1%
		2	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100,00%	100,0%
		3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	100,00%	103,1%
		4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	99%	100,00%	101,0%
		5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	50%	99,60%	199,2%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				**121,3%**
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,96	102,9%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				**102,9%**
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78	N/A	N/A
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98	100,00	102,0%

		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98	100,00	102,0%
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	N/A	N/A
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	N/A	N/A
		6	Indeks Pemgelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3	N/A	N/A
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				**102,0%**
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1, 2 dan 3						**108,7%**

Pekanbaru, 8 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

PENGADILAN TINGGI RIAU

Diah Sulastri Dewi

Lampiran 13 : Capaian Kinerja Periode Januari s.d Desember 2025 (IKU baru)

PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan						
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	100,00%	103,1%
		2	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100,00%	100,0%
		3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	100,00%	103,1%
		4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	99%	100,00%	101,0%
		5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	50%	51,93%	103,9%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				**102,2%**
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,96	102,9%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				**102,9%**
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78	81,58	104,6%
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98	100,00	102,0%

		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98	100,00	102,0%
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	85,00	106,3%
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	85,00	106,3%
		6	Indeks Pemgelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3	3,200	106,7%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				**104,6%**
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1, 2 dan 3						**103,2%**

Pekanbaru, 8 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

Diah Sulastri Dewi

Lampiran 14 : Analisis Efisiensi Anggaran

TABEL EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA

No.	Anggaran (Program/Kegiatan)	Pagu	Realisasi	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Program Penegakan dan Pelayana Hukum/ Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 248.014.000	100%	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	102,2%	**2%**
				2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	102,9%	**3%**
2	Program Dukungan Manajemen/ Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat banding dan Tingkat Pertama & Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Rp 32.752.762.000	99,86%	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	104,6%	**5%**

Kesimpulan:

Pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menghasilkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan

Lampiran 15 : Analisis Efisiensi Sumber daya manusia

TABEL EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA

Jumlah SDM Tahun 2025	Standar Jumlah SDM	Perbandingan Jumlah SDM dengan Standar	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Efisiensi
92 orang	131 orang	70%	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	102,2%	**32%**
			2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	102,9%	**33%**
			3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	104,6%	**34%**

Kesimpulan:

Pengelolaan sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Riau telah dilaksanakan secara efektif dan efisien Walaupun jumlah pegawai belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan, pemanfaatan sumber daya yang tersedia mampu mendukung pencapaian kinerja yang optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Lampiran 16 : Checklist Reviu

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Pekanbaru, 18 Februari 2026

Pereviu I,

(T. Yudianto Syafei Narim, S.IP, S.H., M.M.)

Pereviu II,

(Supriady, S.H.)

Lampiran 17 : SK Tim Penyususn Laporan Kinerja

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU
NOMOR: 67/KPT.W4-U/RA1.1/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
b. bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Mengingat **:**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN.11.2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan ...

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: 44354b0e-c9af-4527-84d3-aa7d73614c06

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI RIAU

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari tahun 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Riau Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimanan mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 5 Januari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Balai Sertifikasi Elektronik

Diah Sulastri Dewi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: 44354b0e-c9af-4527-84d3-aa7d73614c06

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Nomor : 67/KPT.W4-U/RA1.1/I/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI RIAU

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Pelindung	Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.
3	Ketua	SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.
4	Koordinator Penyusun Laporan Kinerja dan Validasi Data	JUNI DWIANTI, S.Si., M.H.
	Sekretaris	YUDI OKTAVIANUS, S.E.
	Anggota	ROBY HIDAYAT, S.T., M.H.
		I.A.N RATNAYANI, S.H., M.H.
		RUSTAM, S.H.
		EFENDI, S.H.
		AMINAH, S.H.
		DERSIMA HARAHAP, S.E., M.H.
		MUHADI, S.E.
		ROMA TUA JUWITA SIHOMBING, S.E.
		MANASE SIAHAAN, S.H., M.H.
		OZZA PROFITA, A.Md.
		HENDRA SETIAWAN, S.Ap.
		RISKON AS SHIDDIQIE, S.H.
5	Koordinator Reviu Laporan Kinerja	SUPRIADY, S.H.
		T. YUDIANTO SYAFEI NARIM, S.IP., S.H., M.M.
	Sekretaris	FADHLIAMIN, S.SI.
	Anggota	BETHARIA OKTAVIANI, S.E.
		MELGISAPUTRA DWI NANDA, S.Kom., M.Kom.
		YUDHI DARMAWAN, S.E.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Balai Sertifikasi Elektronik

Diah Sulastri Dewi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: 44354b0e-c9af-4527-84d3-aa7d73614c06

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Nomor : 67/KPT.W4-U/RA1.1/I/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI RIAU

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Pengadilan Tinggi Riau
2	Ketua	A. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; B. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
3	Koordinator Penyusun Laporan Kinerja dan Validasi Data	Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja dan memvalidasi keabsahan data kinerja
	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja
	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada Pengadilan Tinggi Riau
4	Koordinator Reviu Laporan Kinerja	Mereviu laporan kinerja
	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis reviu laporan kinerja
	Anggota	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualitas

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Balai Sertifikasi Elektronik

Diah Sulastri Dewi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: 44354b0e-c9af-4527-84d3-aa7d73614c06